

Dr. Achmad Syarifudin, M.A

Standarisasi Khatib dan Peran Komunikasi Penyiaran Islam

(Studi pada Jurusan KPI di FDK UIN Raden Fatah Palembang)



Dr. Achmad Syarifudin, M.A

STANDARISASI KHATIB DAN PERAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

ISBN 978-602-0778-11-2



9 786020 778112

RAFAHpress
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat :
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5
Palembang Sumatera Selatan 30125
Telp. 0711 5559959
Email: rafahpress2016@gmail.com

RAFAHpress
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

**STANDARISASI KHATIB
DAN
PERAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM**
(Studi pada Jurusan KPI di FDK UIN Raden Fatah Palembang)

Dr. Achmad Syarifudin, M.A

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**STANDARISASI KHATIB DAN PERAN KOMUNIKASI PENYIARAN
ISLAM**
(Studi pada Jurusan KPI di FDK UIN Raden Fatah Palembang)

Penulis : Dr. Achmad Syarifudin, M.A

Layout : Tim Noerfikri

Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetakoleh:

CV.Amanah

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Oktober 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-0778-11-2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap dihaturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing ummatnya agar senantiasa dalam ridha dan ampunan-Nya. Sebagai penerus perjuangan beliau, kita perlu senantiasa berjihad untuk menegakkan risalahnya sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita masing-masing. Salah satu upaya untuk meneruskan risalah-Nya, dalam bidang akademik adalah melakukan penelitian dan mempublikasikannya agar dapat bermanfaat dan memberi rahmat kepada semakin banyak ummat.

Penelitian ini berjudul “Standarisasi Khatib dan Peran Komunikasi Penyiaran Islam (Studi pada jurusan KPI di FDK UIN Raden Fatah Palembang)” dilatarbelakangi oleh respons terhadap wacana sertifikasi dan standarisasi Khatib yang pernah disounding oleh Menteri Agama beberapa waktu lalu. Wacana itu bukan hanya berdampak pada Ulama, muballigh, da’i dan Para Khatib akan tetapi berdampak pada ummat Islam secara keseluruhan. Polemik yang berkembang adalah jika seorang Khatib tidak memenuhi standar lalu tidak memiliki sertifikat dan dilarang untuk berkhotbah, maka betapa banyak masjid-masjid harus mengganti shalat Jumat dengan shalat Dzuhur akibat tidak ada yang menjadi Khatib atau tidak memiliki Khatib yang berstandar dan tersertifikasi.

Itulah sebabnya penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang perlu atau tidaknya standarisasi Khatib saat ini dan apa peran Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) di Fakultas

Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Jika standarisasi itu memang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan lalu peran prodi KPI betul-betul strategis untuk hal itu, maka tindak lanjutnya adalah mekanisme pelaksanaan dan siapa saja yang patut dilibatkan dalam urusan itu.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa standarisasi Khatib belum perlu dilakukan dan prodi KPI tidak memiliki wewenang terhadap standarisasi Khatib. Alasan belum perlu diberlakukan standarisasi Khatib mengingat bahwa kualifikasi Khatib yang ada saat ini dikhawatirkan belum memiliki standar umum sehingga jika diberlakukan standarisasi maka akan banyak yang tergesur sehingga banyak masjid yang haru mengganti shalat jumat dengan shalat dzuhur karena tidak ada petugas Khatibnya.

Selain itu peran Prodi KPI sesuai dengan Visi dan misinya tidak relevan secara langsung dengan urusan standarisasi Khatib, pelaksana sertifikasi, dsb. Namun upaya untuk meningkatkan kualifikasi para Imam dan Khatib dapat dilaksanakan untuk menambah khazanah keilmuan dan kompetensi para Khatib dalam menjalankan misi khutbah nya agar materi khutbah yang disampaikan membawa pencerahan bagi ummat dan bukan sebaliknya malah membawa keresahan dan kegalauan.

Palembang, Oktober 2018

Peneliti,

Dr. Achmad Syarifudin,M.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka konseptual	9
F. Kerangka Konseptual.....	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	18
I. Rencana Anggaran Biaya.....	19
J. Curriculum Vitae	20
BAB II STANDARISASI KHATIB DAN PERAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	
A. Pengertian Standarisasi Khatib	23
B. Syarat dan Ketentuan Khatib	37
C. Komunikasi Penyiaran Islam dan Peran Institusional	43
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN RF selayang Pandang ...	71
B. Visi,Misi dan Tujuan KPI.....	80
C. Profil Mahasiswa KPI dan deskripsi mata kuliah.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pro-Kontra Standarisasi Khatib	91
B. Peran KPI dalam Standarisasi Khatib	114
C. Kurikukulum Responsif Standarisasi Khatib	118
BAB PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Standarisasi Khatib memiliki dua dimensi yang menyebabkan pro-kontra bagi para Ulama, muballigh dan Da'i. Sebagai upaya mewujudkan kompetensi dan kualifikasi yang baik bagi para Khatib adalah hal yang sangat positif agar masyarakat pengguna (stake holder) menjadi tercerahkan. Jika ini yang diinginkan dari standarisasi, maka akan menjadi harapan dan keniscayaan bagi semua umat Islam. Melalui forum-forum silaturahmi kegiatan peningkatan kapasitas Khatib dapat dilakukan. Akan tetapi, jika standarisasi dijadikan sebagai upaya seleksi, penilaian kredibilitas terkait grade studi yang ditempuh, atau pembatasan materi khutbah, maka ini bertentangan dengan eksistensi dari para Khatib dan eksistensi masjid yang ada di Indonesia. Sebab, masjid yang berdiri di negeri ini adalah swadaya masyarakat dan yang memilih orang-orang untuk menjadi Khatib adalah seleksi berdasarkan ukuran moral dan kualifikasi religiusitas mereka. Maka dari itu, berdasarkan penelitian ini, standarisasi Khatib belum diperlukan saat ini, dan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dipandang belum perlu melibatkan diri dalam persoalan standarisasi Khatib.

Abstract:

Standardization of the Khatib has two dimensions that lead to the agree and contradiction of the Ulama, the muballigh and Da'i. As an effort to realize good competencies and qualifications for the Khatib is a very positive thing so that the stake holders become enlightened. If this is desired from standardization, it will be a hope and necessity for all Muslims. Through gathering forums activities can be improved on Khatib capacity. However, if standardization is used as an effort to select, assessing credibility regarding the grade of study taken, or limiting the material of the sermon, then this is contrary to the existence of the Khatib and the existence of mosques in Indonesia. Because, mosques that stand in this country are self-help communities and those who choose people to become Khatib are selection based on their moral size and religiosity qualifications. Therefore, based on this research, the standardization of Khatib is not needed at this time, and Islamic Broadcasting Communication Study Program is deemed not necessary to involve itself in the issue of Khatib standardization.

تجريد:

ان تقييس الخطيب له بعدان يؤديان إلى إيجابيات وسلبيات كل من العلماء والمبلغين والداعي . كجهد لتحقيق الكفاءات والمؤهلات الجيدة للخطيب هو أمر إيجابي للغاية بحيث يصبح أصحاب المصلحة مستنيرين . إذا كان هذا مطلوبًا من المعيار ، فسيكون ذلك بمثابة أمل وضرورة لجميع المسلمين . من خلال جمع أنشطة المنتديات يمكن تحسينها على قدرة الخطيب . ومع ذلك ، إذا تم استخدام التقييس كمحاولة للاختيار ، أو تقييم المصادقية فيما يتعلق بدرجة الدراسة المتخذة ، أو الحد من مادة العظة ، فإن ذلك يتعارض مع وجود الخطيب ووجود المساجد في إندونيسيا . لأن المساجد التي تقام في هذا البلد هي مجتمعات مساعدة ذاتية من سكان المسلمين، وأولئك الذين يختارون الناس لكي يصبحوا خطيب هم الاختيار على أساس حجمهم الأخلاقي ومؤهلاتهم الدينية . لذلك ، وبناءً على هذا البحث ، ليس هناك حاجة إلى تقييس الخطيب في هذا الوقت، ولا يعتبر برنامج قسم الاتصالات الإسلامية و نشرها ضروريًا لإشراك نفسه في مسألة تقييس الخطيب .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdebatan mengenai sertifikasi Khatib yang belakangan dinilai “hoax” dan secara resmi dinyatakan oleh Kepala PINMAS Kemenag RI¹ menjadi tema yang menarik untuk didiskusikan. Menurut Mastuki, Kementerian Agama tidak akan melakukan sertifikasi khatib. Kementerian Agama juga tidak akan mengintervensi materi khutbah. Merespon saran dan masukan dari masyarakat, Kementerian Agama sedang mempertimbangkan untuk melakukan standardisasi khatib Jumat. Maksud dari standardisasi, kata Mastuki, adalah memberikan kriteria kualifikasi atau kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang khatib Jumat agar khutbah disampaikan oleh ahlinya, serta sesuai syarat dan rukunnya. Dalam praktiknya, standardisasi juga tidak akan dirumuskan Kementerian Agama karena hal itu menjadi domain ulama. "Hanya ulamalah yang memiliki otoritas, kewenangan, memberikan standar, batasan kompetensi seperti apa yang harus dipenuhi oleh seorang khatib dalam menyampaikan khutbah Jumat," ucapnya.

¹ Jakarta (Pinmas), Kepala Pusat Informasi dan Humas (Pinmas) Kementerian Agama Mastuki memastikan bahwa info sertifikasi khatib yang viral melalui media sosial adalah berita bohong alias *hoax*. Penegasan ini disampaikan oleh Mastuki menyusul beredarnya informasi seputar hal teknis penyelenggaraan sertifikasi khatib. "Saya pastikan info sertifikasi khatib yang viral di media sosial adalah info bohong atau *hoax*," tegasnya di Jakarta, Senin (06/02). Beredar melalui pesan berantai, kabar dengan tajuk 'Info Sertifikasi Khatib'. Kabar ini memuat informasi terkait persyaratan, kegiatan sertifikasi, kewajiban Khatib bersertifikat, serta hak khatib bersertifikasi dari Kemenag.

Penentuan standarisasi seorang khatib, sepenuhnya kompetensi ulama, bukan domain Kemenag. Kemenag hanya sebagai fasilitator," imbuhnya. Terkait itu, lanjut Mastuki, saat ini Kementerian Agama masih menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat. Akhir Januari lalu, Kemenag telah mengundang para tokoh dari MUI, NU, Muhammadiyah, ormas Islam dan beberapa fakultas dakwah untuk duduk bersama menyerap aspirasi. Akan tetapi, yang berkembang di masyarakat adalah kegelisahan, kekhawatiran bagi sejumlah kalangan terkait dengan wacana standarisasi Khatib tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa standarisasi dianggap upaya membelenggu kreativitas dan inovasi dari para khatib yang umumnya juga muballigh dan para Da'i. Selain itu, masjid-masjid yang ada di Indonesia adalah swadaya mayoritas masyarakat sehingga kebutuhan akan Khatib sangat tinggi.

Bagi praktisi dan akademisi di bidang ilmu dakwah dan Komunikasi kepenyiaran Islam ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Sebab, persoalan kualifikasi seorang muballigh atau da'i baik yang menyampaikan pesan moral keagamaan secara langsung maupun melalui media sering kali dialami oleh objek dakwah (*mad'u*). Alasannya cukup beragam, mulai dari bahasa yang digunakan, materi yang tidak relevan, intelektualitas yang belum mumpuni hingga karakteristik da'i yang berseberangan dengan norma-norma keagamaan/keislaman.

Fenomena tentang karakteristik Da'i di Indonesia cukup unik dan menarik untuk diteliti. Perdebatan tentang sebutan da'i saja masih sering terjadi karena secara istilah ada perbedaan yang mendasar antara da'i dan muballigh. Ada yang mengatakan bahwa muballigh bukanlah

da'i karena bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki kriteria tertentu. Ini berbeda dengan da'i yang lebih cenderung dimaknai sebagai seorang yang 'alim, memiliki intelektualitas yang baik, ditopang dengan perilaku yang piawai, dsb. Lebih krusial lagi jika belakangan istilah "Ustadz" juga menjadi perbincangan baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

M. Natsir pernah menyatakan bahwa dakwah adalah usaha-usaha menyeru dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia didunia ini, dan yang meliputi *al-amar bi al-ma'ruf an-nahyu an al-munkar* dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.² Statemen ini memperkuat bahwa siapa pun yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, membimbing kebaikan dan menebarkan rahmat bagi semesta alam. Siapa pun itu maka dapat dikategorikan sebagai Da'i.

Dasar hukumnya jelas sebagaimana termaktub dalam firman Allah QS: Ali Imran (3): 104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS: Ali Imran (3): 104).³

²Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.3.

³Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h.50

Pada hakekatnya khutbah adalah bagian dari bentuk dakwah. Sebagai proses dakwah tentu ada misioner memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat sebagai mad'u. Baik dari golongan tua, muda ataupun anak-anak yang mayoritas pengetahuan agamanya sangat kurang. Sehingga perlu diadakannya kegiatan dakwah berupa bimbingan mengenai aturan-aturan kehidupan sehari-hari atau yang berkenaan dengan ibadah sesuai dengan tuntunan agama. Supaya manusia mendapat pengetahuan baru sebagai bekal dalam menjalankan hidupnya, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dakwah adalah perjuangan yang besar dan berat, karena dakwah berarti pembangunan umat manusia dalam segala bidang dan lapangan kehidupan. Oleh karena itu, dakwah memerlukan berbagai persiapan dan bahan yang cukup banyak sebagai media dakwah dan dapat mengantarkan perjuangan umat islam kepada tujuannya. Maka umat islam harus melakukan kerja sama yang kuat sehingga menjadi satu kesatuan umat yang disebut organisasi. Organisasi merupakan alat perjuangan yang paling tepat untuk mencapai maksud dan tujuan bersama, sebab organisasi pada dasarnya berupaya menghimpun kekuatan dan mengatur pembagian pekerjaan, sehingga dapat mencapai hasil maksimal dengan cara kerja yang lebih efisien, baik dalam penggunaan tenaga maupun dana dengan hasil yang optimal.

Salah satu komponen dakwah yang sangat urgen adalah Da'i (orang yang menyeru dakwah). Dalam ilmu Komunikasi Da'i disebut Komunikator. Kenapa dikatakan urgen? Karena setiap penyimpangan moral, perilaku *uncivilised*, kekacauan dalam masyarakat biasanya

Da'i selalu dipertanyakan. Sebaliknya, kondisi yang harmonis, kehidupan yang nyaman, aman dan tenteram dalam sebuah masyarakat bukanlah terjadi secara "*bim salabim abah kadabrah*". Namun dalam hal itu ada peran institusional para da'i baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau tersembunyi telah bermain secara signifikan.

Fenomena mencuatnya beberapa Da'i selebritis karena kemajuan teknologi terutama media sosial seperti facebook, you tube, What's app, dsb. membuat dunia kedakwaan menjadi tersoroti. Ambil contoh "Mama Dedeh" yang ditayangkan Indosiar, ada lagi "Ustadz Maulana" dalam acara "Islam itu indah" yang juga populer dari aktifitas ceramahnya dishare melalui You tube. Masih banyak lagi yang mendulang sukses dalam berdakwah melalui media-media baru (*new media*). Di dalam kehidupan real masyarakat perkotaan, padatnya aktivitas ceremonial yang ada menjadi faktor meningkatnya kebutuhan terhadap da'i yang bisa menyampaikan *dakwah bi al-lisan* khususnya.

Persoalannya, tidak sedikit di antara muballigh/ da'i yang belum memiliki kapastitas ilmu dakwah yang baik, bahkan ilmu tentang keislamannya juga masih sangat minim sehingga tidak jarang menimbulkan keresahan bagi sasaran dakwahnya. Misalnya, dulu pernah terjadi seorang narasumber sebuah acara keagamaan yang melakukan kesalahan dalam penulisan ayat al-Quran, maka sontak respon masyarakat meluas terlebih melalui viral saat ini. Acara yang ditayangkan oleh salah satu media cetak terkenal itu pun tak lepas dari hujatan dari kalangan umat Islam. Peristiwa itu pun berujung pada kredibilitas seorang Da'i. Pada saat lain, ketika seorang menyampaikan

khutbah Jumat tanpa menggunakan buku khutbah dianggap kurang pas atau mendekati tidak sah.

Belum lagi jika da'i tersebut membawa misi sebuah organisasi politik sehingga dia harus menyesuaikan materi dakwahnya dengan visi dan misi salah satu calon yang akan diusung untuk menjadi kepala daerah tertentu. Fenomena ini yang menjadi alasan bahwa Pemerintah perlu melakukan standarisasi bagi para Khatib itu terutama pada khutbah Jumat. Namun, sayangnya, wacana itu sontak menuai kritik dari berbagai kalangan; ulama, da'i, muballigh bahkan para anggota DPR merespon ini sebagai sesuatu yang perlu dicermati lebih serius. Selain itu, persoalan apa saja yang perlu distandarisasi, siapa yang berhak melakukan standarisasi, lalu bagaimana proses standarisasi itu bisa berlangsung adalah persoalan berikutnya.

Di sisi lain, eksistensi prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) di fakultas Dakwah dan Komunikasi, tidak terkecuali di UIN Raden Fatah Palembang, secara institusional adalah pengemban wewenang kedakwahan. Namun dalam realita jarang sekali dilibatkan pada urusan-urusan praktis di dalam masyarakat. Sedianya, intitusi ini menjadi agen bagi transformasi generasi da'i yang berkualitas, dan menjadi rujukan dalam setiap persoalan dakwah yang timbul di dalam masyarakat. Namun, seiring dengan pergeseran waktu dan persaingan global maka visi dan misi prodi KPI pun mengalami perubahan. Tak ayal, persoalan Khatib pun dipandang bukan menjadi persoalan KPI. Untuk itu tema Standarisasi Khatib penting untuk diteliti dengan judul "Standarisasi Khatib dan Peran Komunikasi Penyiaran Islam (Studi pada Prodi KPI di FDK UIN Raden Fatah Palembang)".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan itu dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Perlukah standarisasi Khatib dilakukan di Palembang?
2. Bagaimana mekanisme peningkatan kompetensi dan kualifikasi para Khatib yang ada?
3. Adakah peran strategis jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dalam mewujudkan khatib yang kualified?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

- Untuk mengetahui perlu atau tidak nya standarisasi Khatib di Indonesia.
- Untuk mengetahui mekanisme peningkatan kompetensi dan kualifikasi Khatib yang ada?
- Untuk mengetahui peran KPI dalam melakukan standarisasi mewujudkan Khatib yang kualified.

D. Penelitian terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang serupa dengan kajian ini di antaranya: Penelitian tentang Kualifikasi da'i Sebuah Pendekatan Idealistik dan Realistik⁴ yang dilakukan oleh Aliyudin menemukan bahwa seorang da'i secara spesifik harus memiliki kualifikasi dalam intelektualitas, spiritual dan mental. Ini jika da'i dipahami sebagai

⁴ Kualifikasi da'i **Sebuah Pendekatan Idealistik dan Realistik**, jurnal **ANIDA** Vol 14 No 2 Juli-Desember 2015 p-ISSN 1410-5705 diakses dari <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida> DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/anida.v14i2.840>, pada Maret 2017.

tugas utama sebagai seorang muslim yang memiliki profesi muballigh atau da'i secara khusus. Namun studi ini menjelaskan bahwa da'i dalam pengertian umum tidak harus memiliki kualifikasi sebagaimana kategori pertama tersebut. Yang penting adalah bagaimana seorang muslim dapat menjadi contoh bagi orang lain dalam menjalankan ajaran Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozi, Dosen KPI UINSA terkait dengan sertifikasi khatib, menyimpulkan bahwa sertifikasi tidak menjadi sesuatu yang urgen untuk konteks saat ini, dimana masyarakat memberikan keleluasan kepada para khatib untuk menyampaikan materi khutbahnya yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Khatib itu gelar keagamaan yang orientasi utamanya adalah ibadah sehingga klaim adanya muatan radikalisme atau penyebab munculnya radikalisme atas nama agama tidak dipengaruhi oleh materi khutbah khatib di atas mimbar. Selain itu, Respon mayoritas khatib di Kota Mataram tentang sertifikasi khatib adalah kurang bijak dan kurang tepat pemerintah mensertifikasi khatib karena khatib itu merupakan tugas informal masyarakat dalam menyampaikan pesan ibadah keagamaan, dan khatib menjadi prasyarat sahnya ibadah Jumat. Dengan demikian sertifikasi akan berdampak terhadap keberlangsungan ibadah Jumat jika sewaktu-waktu.⁵

Penelitian yang dilakukan Arsam tentang Persepsi Para Mubaligh Persepsi Para Mubaligh Persepsi Para Mubaligh Terhadap erhadap Wacana Kontroversi Standardisasi acana Kontroversi

⁵Fahrurrozi, Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respons Para Da'i di Kota Mataram fahrurrozi@uinmataram.ac.id, Jurnal Komunikasi Islam | ISBN 2088-6314 | Terakreditasi Menristekdikti SK. N O . 2/E/KPT/2015 | Volume 08, Nomor 01, Juni 2018. Diakses pada 5 Agustus 2018.

Standardisasi acana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh Khatib dan Sertifikasi Mubaligh (Studi Terhadap Para Mubaligh terhadap Para Mubaligh di Banyumas) menyimpulkan bahwa: a) mendukung adanya standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh dengan catatan dimulai dengan adanya pelatihan dan mendapatkan gaji dari pemerintah. b). Pandangan yang menolak adanya standardisasi khatib dan sertifikasi mubaligh. Kedua istilah tersebut dipandang tidak tepat dan yang lebih tepat adalah dibentuknya forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib yang di dalamnya diisi dengan sharing sharing seputar problematika mubaligh dan keumatan. c). Pandangan alternatif yaitu memberikan alternatif baru dengan memberdayakan penyuluh agama yang ada di lingkungan Kementerian Agama untuk mendampingi para mubaligh atau membentuk forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yaitu secara kualitatif menelusuri data-data tentang pandangan Pemerintah tentang kondisi dan harapan terhadap idealitas Da'i/Khatib di masyarakat. Peran strategis Visi dan orientasi Prodi KPI fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah.

⁶ Arsam, Persepsi Para Mubaligh Persepsi Para Mubaligh Persepsi Para Mubaligh Terhadap erhadap Wacana Kontroversi Standardisasi acana Kontroversi Standardisasi acana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh Khatib dan Sertifikasi Mubaligh (Studi Terhadap Para Mubaligh terhadap Para Mubaligh di Banyumas), KOMUNIKA, Vol. 11, No. 2, Juli - Desember 2017 diakses pada September 2018.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif induktif, yakni menggambarkan kondisi real Prodi KPI dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam aktivitas dan perannya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, Kemenag sebagai pemangku Kebijakan dan mahasiswa sebagai aktor perubahan yang akan menjadi calon da'i dan Khotib.

3. Metode Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama Kantor Wilayah Sumatera Selatan bidang Penerangan Agama Islam (PENAIIS), Pihak Program Studi KPI meliputi Dekan, Kaprodi dan salah seorang Dosen prodi KPI.

b. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penelitian, digunakan beberapa metode di antaranya adalah:

1). Wawancara,

Yaitu melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian terkait dengan standarisasi Khatib dan peran Prodi KPI FDK UIN Raden Fatah Palembang.

2). Dokumentasi

Yaitu memeriksa dokumen terkait dengan kajian yang dilakukan, misalnya berupa catatan tertulis, jika ada.

3). Observasi, pengamatan langsung pada pelaksanaan aktivitas pengembangan kualifikasi calon alumni prodi KPI meliputi da'i/muballigh terkait dengan apa yang dilakukan oleh Fakultas dan

Prodi, misalnya telaah kurikulum dan pemanfaatan laboratorium dan praktek ibadah kemasyarakatan.

c. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui penyajian data, reduksi dan penarikan kesimpulan. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif maka penelitian ini tidak menggunakan angka-angka kuantitatif, namun menganalisis tanggapan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

F. Kerangka Konseptual

Khatib adalah predikat atau sebutan yang dialamatkan kepada seseorang yang menyampaikan khutbah. Dalam ilmu Komunikasi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi intra personal antara komunikator dengan komunikan yang terjadi di tempat tertentu yaitu Masjid. Khutbah sama halnya ceramah yang dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pidato yang bertujuan memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Audiens yang dimaksud disini adalah keseluruhan untuk siapa saja, khlayak ramai, masyarakat luas, atau lazim. Jadi ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasehat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. A.G. Lugandi menambahkan, ceramah agama adalah suatu penyampaian informasi yang bersifat searah, yakni dari penceramah kepada hadirin.⁷

Beda lagi dengan pendapat Abdul Kadir Munsiy, beliau

⁷ G. Lugandi, *Pendidikan Orang Dewasa (Sebuah Uraian Praktek, Untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih dan Penyuluh Lapangan)*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 29

berpendapat bahwa ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah dihadapan orang banyak. Jadi yang dimaksud dengan ceramah agama yaitu suatu metode yang digunakan oleh seorang da'i atau muballigh dalam menyampaikan suatu pesan kepada audien serta mengajak audien kepada jalan yang benar, sesuai dengan ajaran agama guna meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Da'i disebut juga dengan juru dakwah atau lebih sering dikenal dengan komunikator dakwah, yaitu orang yang harus menyampaikan suatu pesan atau wasilah. Menurut Wahyu Ilaihi, M. A. Dalam "*Komunikasi Dakwah*", untuk dikenal sebagai dai atau komunikator dakwah itu dapat dikelompokkan menjadi dua⁸, yaitu: a) Secara umum adalah setiap muslim atau muslimah yang mukallaf (dewasa) dimana kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah "*Sampaikan walau satu ayat*". Secara Khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus (*mutakhasis*) dalam bidang agama Islam, yang dikenal dengan panggilan ulama.

Dalam bukunya Superfikir yang berjudul "*Islamic Public Speaking A Powerful Secret for Powerful Muslim Public Speaker*" dijelaskan bahwa ada tiga kriteria pokok yang harus dipahami oleh para da'i yang berperan sebagai khatib dan mubaligh. Diantaranya yaitu: a) Memiliki kepribadian Islam yang tangguh sehingga pola pikir dan pola sikapnya bisa diteladani oleh kaum muslimin. b) Wawasan

⁸ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 77

yang luas, baik yang terkait dengan ajaran Islam itu sendiri yang memang menjadi tema utama dalam dakwah maupun wawasan kekinian. c) Kemampuan atau keterampilan (*skill*) dakwah sehingga jika berdakwah dengan cara berkhotbah atau berceramah, khotbah dan ceramahnya itu menarik, enak didengar, dan jamaah antusias untuk mendengarkannya.⁹

Selain itu, seorang da'i yang baik perlu memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Ikhlas

Seorang da'i dalam menjalankan da'wahnya tidak boleh bertujuan untuk mendapatkan pujian, harta, pangkat dan dunia. Seorang da'i harus menjadikan da'wah semata untuk mencari ridha Allah. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Yusuf. Hal ini perlu diperhatikan dan harus dimulai dari perkara niat, sebagaimana hadist Rasulullah dari Umar bin Khattab,

"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan." (HR. Bukhari). Sebab itu, niat merupakan perkara yang dapat mempengaruhi kadar amal seseorang dihadapan Allah, sebab niat seseorang akan mempengaruhi nilai amalannya. Sehingga jika ia meniatkan untuk suatu hal maka yang akan didapatinya hanyalah seperti hal itu.

⁹ Superfikir, *Islamic Public Speaking A Powerful Secret for Powerful Muslim Public Speaker*, (Solo: Tinta Medina, 2012), h. 24-26

b. Ilmu

Sejauh mana da'wah bisa dirasakan oleh seorang mad'u, tergantung pada ilmu yang dimiliki, cara penyampainya serta dalamnya ilmu yang dimilikinya. Ilmu sangat penting "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata; aku mendengar Mu'awiyah memberi khutbah untuk kami, dia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah faqihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa ummat ini akan tegak diatas perintah Allah, mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisih mereka hingga datang keputusan Allah".(HR. Bukhari)

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam tidak meninggalkan atau mewariskan dirham, tapi mewariskan ilmu, dan inilah sebaik-baik warisan.

c. Akhlak yang baik (Khusnul khuluk)

Ciri dari akhlak yang baik yang dimiliki oleh seorang da'i adalah:

1. Semua hal yang bermanfaat bagi manusia ia berikan.
2. Menahan diri untuk tidak menyakiti manusia, sekecil apapun atau sebesar apapun, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.
3. Bersabar dari apa yang ia temui. Jika ia mendapatkan atau menemui kebaikan maka ia bersabar, dan jika ia menemui keburukan maka ia bersabar pula.

4. Jika ada yang menyakitinya, ia mampu menahan diri dan bisa menampung perilaku-perilaku tersebut. Ia paham sebagai seorang da'i ia harus mampu dan siap menanggung derita. Rasulullah bersabda "Penghuni surga itu ada tiga; pemilik kekuasaan yang sederhana, derma dan penolong, seorang yang berbelas kasih, berhati lunak kepada setiap kerabat dan orang muslim yang sangat menjaga diri dan memiliki tanggungan." "Penghuni surga itu ada tiga; pemilik kekuasaan yang sederhana, derma dan penolong, seorang yang berbelas kasih, berhati lunak kepada setiap kerabat dan orang muslim yang sangat menjaga diri dan memiliki tanggungan." (HR. Bukhari).

Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang banyak memasukkan orang disurga. Rasulullah menjawab: "Akhlik yang baik". Orang yang baik akhliknya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari akhir nanti juga adalah orang yang paling baik akhliknya.

Hendaknya para da'i memperhatikan dengan benar masalah akhlak ini, sebab akhlak yang baik merupakan posisi yang menentukan diterimanya dakwah kita oleh orang lain. Betapa banyak ahlu bid'ah yang mengajak kepada kebatilan, namun karena akhlak yang ia tunjukkan pada orang-orang baik, lembut, simpati sehingga membuat da'wahnya diterima. Begitu pula sebaliknya, betapa banyak para da'i syar'i yang menyebarkan kebaikan, namun karena ia tidak peka, tidak lembut, dan tidak santun, membuat da'wahnya sulit diterima oleh masyarakat. Lihatlah bagaimana Rasulullah bersikap sebagai seorang

da'i, hampir sebagian besar para sahabat yang masuk Islam di awal-awal kenabian beliau adalah akibat ketinggian dan keagungan akhlak Beliau.

d. Bersabar

Sabar merupakan amalan mulia. Seorang da'i harus mampu mengaplikasikan sabar dalam hidupnya. Seorang da'i harus bersabar ketika manusia berpaling dan tidak mengikuti dakwahnya atau berpaling darinya. Jika hal ini terjadi maka kita harus berpikiran positif, tidak boleh patah semangat dan berdo'a kepada Allah. Berda'wah tidaklah sesederhana membalik telapat tangan, kadang ada orang yang langsung memahami dan menerima da'wah kita, ada juga yang butuh waktu lama untuk dapat memahami dan menerima da'wah kita, bahkan mungkin ada yang meninggalkan atau menyakiti kita. Hal ini membutuhkan kesabaran yang besar. Bisa dilihat dari contoh-contoh dari para nabi dan Rasul ketika berdakwah. Nabi Nuh as, Nabi Musa as dan Nabi Muhammad SAW.

Mesti bersabar meninggalkan hal-hal yang mubah. Seperti bersenang-senang dengan keluarga dan bercanda dengan sahabat-sahabatnya, dan lain-lain. Bersabar dari kurangnya harta. Seorang da'i harus bersabar ketika ia tau bahwa dengan menjadi da'i harta berupa duniawi akan sedikit ia miliki, sebab ia paham bahwa kekayaan yang akan ia raih adalah kekayaan ruhaniyah. Bersabar dalam kelalaian dunia. Seorang da'i tentu memiliki waktu yang kurang dengan dunia, da ini kadang membuatnya lalai dari dunia.

e. Hikmah

Hikmah adalah menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menekuni amalan yang dilakukannya secara

professional. Seorang da'i harus bersikap lemah lembut dan memperhatikan masalah dalam da'wahnya serta mndahulukan yang penting. Jika da'i memiliki karakteristik yang ideal seperti disebutkan di atas maka standar untuk seorang Da'i menjadi baik dan dapat melaksanakan dakwahnya secara maksimal.

Wacana sertifikasi dan standarisasi Khatib merupakan wacana yang digelontorkan oleh Menteri Agama pada tahun lalu. Ini membawa dampak kontroversi baik di kalangan pemerintah sendiri, para Ulama, Da'i, Muballigh, akademisi dan masyarakat secara umum. Terjadi pro-kontra tentang khatib yang berstandar dan bersertifikasi.

G. Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Waktu	Keterangan
1	Penyusunan dan Penulisan Proposal	17 Januari – 15 Maret 2018	
2	Penyerahan Proposal	Maksimal 5 Agustus 2018	
3	Penelusuran Referensi	Minggu III Agustus 2018	
4	Penyusunan Instrumen Pengumpul data	Minggu IV Agustus 2018	
5	Wawancara Penelitian, observasi dan dokumentasi	Minggu I – II September 2018	
6	Analisis Data	Minggu III – IV September 2018	
7	Penyusunan Laporan	Minggu I – IV September 2018	
8	Seminar hasil Penelitian	Minggu ke IV bulan Oktober	
9	Penyerahan Laporan	Minggu I Nopember 2018	
10	Submit artikel ke Jurnal	Minggu ke III – IV Nopember 2018	

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penyajian hasil penelitian ini maka Peneliti menyusun sistematika Penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, jadwal Penelitian, sistematika Pembahasan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bab II Kerangka Teori tentang STANDARISASI DA'I dan KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM meliputi Da'I dan karakteristiknya, Hakekat Komunikasi Penyiaran Islam dan Tanggung Jawab Jurusan KPI terhadap aktivitas Dakwah masyarakat.

Bab III Deskripsi Prodi KPI FDK UIN RF Palembang meliputi, Profil KPI, kondisi mahasiswa KPI dan Kurikulum KPI.

BAB IV Analisis dan Pembahasan meliputi Pro-Kontra tentang wacana standarisasi Khatib, Mekanisme standarisasi dan Peran KPI dalam standarisasi Khotib.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan Saran.

I. Rencana Anggaran Biaya

Rancangan anggaran biaya yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Vol	Frek	Satuan	Jumlah dalam Rupiah
1	- Belanja ATK dan Bahan	1	Paket		3.195.000,-
2	Pelaksanaan	160	OJ	25.000	4.000.000,-
	- Pembayaran Pembantu Peneliti (2 orang x 80 Jam)				
	- Uang Saku Peneliti Luar Kota	10	OH	380.000	3.800.000,-
	FGD Penelitian				
	- ATK Bahan, Seminar Kit, Snack, Konsumsi, seminar Kit Peserta	1	Paket		6.625.000,- 14. 425. 000,-
3	Pasca Pelaksanaan				
	- Fotocopy dan Jilid Laporan	5	exp exp	75.000	375.000
		10	exp	50.000	500.000
	- Pembuatan Dummy	35		50.000	1.750.000
	- Cetak Hasil Penelitian				2.625.000
	Total (1+2+3)				21.000.000,-

J. Curriculum Vitae

IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. Achmad Syarifudin, S.Ag, MA
Nip/ Nik : 19731110 200003 1 003
NIDN : 2010117302
Tempat /Tanggal Lahir : Sriwangi, 10 November 1973
Jenis Kelamin : Pria
Status Perkawinan : kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
IAIN Raden
Fatah Palembang
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : IAIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jln. Prof.K.H.Zainal Abidin Fikry kode pos
30126 Palembang
Telp/faks :0711 354668, fax 0711 356209
Alamat : Jl.Sukarno Hatta Komplek
Perumda/perumdam Griya
Revani Blok B2 No.17 RT.14/05
Kel.tlg.Kelapa
Kec.Alang-alang Lebar Palembang 30154
Palembang 30153. Telp. 081373087879
Alamat Email : www.syarif_achmad@yahoo.co.id
Achmadsyarifudin73@gmail.com

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota/Tim	Sumber dana
2011	Survey Literatur, Kurikulum dan Tenaga Ahli Studi Informasi di Indonesia	Anggota	DIPA 2011
2012	Perancangan ujian Masuk berbasis Komputer di IAIN Raden Fatah Palembang	Anggota	DIPA 2012
2014	Efektifitas finger print dalam meningkatkan kinerja pegawai	Anggota	DIPA 2014
2015	Strategi Dakwah bi al-Kitabah: Efektifitas penggunaan bahasa	Ketua Tim	DIPA Fakultas 2015
2016	Strategi Komunikasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab: Studi pada fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah	Ketua Tim	Dicetak oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi

KARYA ILMIAH

2013	Kelalaian orang tua	Mimbar, Koran Harian Sumeks
2013	Dakwah Pluralis	Jurnal Wardah
2014	Facebook sebagai media Dakwah	Jurnal wardah
2015	Dakwah Komunikatif, Why Not?	Wardah
2015	Senang dan Bangga Belajar Bahasa Arab	Buku dicetak oleh Noer Fikri Palembang
2015	Pemikiran Islam: Tauhid dan Ilmu Kalam	Dicetak oleh Noer Fikri Palembang

2017	Analisis Kebutuhan dalam Pembelajaran Bahasa Arab di IAIN Raden Fatah Palembang	
2018	Analisis Kebutuhan “materi Ajar” pada pembelajaran keterampilan Berbicara.	Intizar Desember
2018	Pendidikan Islam tanpa Bahasa Arab, mungkinkah?	Dipresentasikan dalam acara Seminar Nasional IKALUIN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB II

STANDARISASI KHATIB DAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

A. Pengertian Standarisasi Khatib

Standardisasi dalam KBBI adalah: penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan. Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu, sedang pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksi merupakan usaha simplifikasi. Standardisasi adalah proses pembentukan standar teknis, yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar (atau praktik), dll.

Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembandingan kuantita, kualita, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Tidak boleh tidak standar harus atau sedapat mungkin diikuti agar supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima umum oleh penggunaan *standee* atau ukuran ini adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industry dimana perusahaan itu berada. Misalnya industry mobil di Amerika Serikat bersepakat untuk membuat mesin yang silindernya dapat dipergunakan segala macam merek busi mobil, atau malah terdapat sepakat antara industry mobil dan industry busi agar segala macam busi dapat dipasang di segala mesin mobil dan sebagainya.

Standardisasi adalah usaha bersama membentuk standar. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.

Hakiki dan tujuan standar ini dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut : jika seluruh dunia memproduksi kran dan pipa air dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, maka tidaklah mungkin berbagai pipa saling bersambung karena masing-masing pipa tidak serasi dengan pipa lainnya. Untuk itu diperlukan adaptor. Bilamana setiap produsen pipa dan keran air boleh memproduksi pipa semaunya tanpa memperhatikan ukuran pipa produsen lain, maka hasilnya terjadi kekacauan.

Khatib adalah orang yang menyampaikan khutbah atau pengkhotbah. Istilah khatib digunakan khusus oleh umat Islam yakni seorang penyampai khutbah ketika dalam pelaksanaan shalat Jumat. Selain shalat jumat sesungguhnya penyampai khutbah iedul fitri atau iedul adha (dua hari raya) disebut Khatib, yakni Khatib idul fitri atau iedul adha.

Khutbah merupakan bentuk *public speaking* yang dilakukan oleh khatib guna menyampaikan tausiyah keagamaan, berisi informasi tentang keimanan, syari'ah dan akhlak agar pendengar (audiens) memperoleh ilmu baru atau upgrading informasi agar meningkat pengetahuan, motivasi keagamaan.

Berbeda dengan ceramah atau tabligh pada umumnya, Khutbah yang disampaikan melalui mimbar pada jumat atau hari Raya terikat

dengan ketentuan-ketentuan khusus baik menyangkut materi khutbah, kaifiyat dan yang menyampaikannya (Khatib).

Wacana tentang standarisasi Khatib berangkat dari respons Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terhadap keresahan masyarakat tentang rencana sertifikasi pendakwah. Menurut dia, hal tersebut tidak terlepas dari persoalan politik pemilihan kepala daerah dan kondisi perekonomian dewasa ini. Menurutnya, “Era globalisasi dan era digital juga mempengaruhi informasi berseliweran seperti air bah. Persoalan kemasyarakatan akan sangat dinamis karena dapat diakses dengan cepat,” katanya kepada *Tempo* di ruang seminar Perpustakaan IAIN Purwokerto, Jumat, 10 Februari 2017.¹⁰

Persoalan khatib yang melakukan khotbah dengan syiar kebencian, kata Lukman, sudah ada sejak jauh sebelum dia menjabat sebagai Menteri Agama. Maraknya hal tersebut, ada empat hal dari masyarakat yang diadukan kepadanya tentang khotbah yang meresahkan. Pertama, khotbah sering membahas persoalan khilafiah. Padahal, ujar Lukman, masjid merupakan tempat umum. “Orang NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain kan bebas mau salat di mana saja. Ini permasalahan di internal umat Islam,” katanya.

Kedua, khotbah kerap menyalahkan agama lain. Ini sering terjadi di masjid perkampungan. Ketiga, pilkada membuat khatib cenderung berpihak kepada salah satu calon dengan isi khotbah yang penuh kepentingan. Sedangkan keempat, khotbah yang sering

¹⁰ Lukman Hakim Saifudin, Standardisasi Khatib, Ini 4 Alasan Kompetensi Perlu Dibahas) <https://nasional.tempo.co/read/845252/standardisasi-khatib-TEMPO.CO, Jakarta>.

mempersoalkan Pancasila sebagai *thogut*. “Kemenag sebagai representasi pemerintah tentunya ingin menempatkan agama pada posisi terhormat,” katanya. Untuk menyikapi hal tersebut, Lukman mengaku sudah mengumpulkan perwakilan ormas Islam dan akademisi di bidang dakwah UIN. “Akhirnya muncul standardisasi dan sertifikasi. Pemerintah tidak memunculkan istilah itu karena implikasi akan berbeda. Sedangkan standardisasi begitu sangat akademik. Bahasa yang lebih mudah adalah membuat pedoman bersama,” katanya mengungkapkan.

Pedoman tersebut, ujar Lukman, yang menentukan adalah ulama perwakilan ormas. Sedangkan peran Kemenag adalah memfasilitasi pertemuan. Hal tersebut dianggapnya penting untuk dilakukan, agar kesucian agama tidak terkotori dengan kepentingan tertentu. “Keberadaan rumah Tuhan harus dijaga dengan baik. Itu semangat pemerintah. Isinya apa itu domain ulama, bukan *umaro*,” ujarnya.

Rencana Kementerian Agama melakukan standardisasi khatib atau penceramah salat Jumat menuai beragam reaksi. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai An'im Falahuddin Mahrus, menilai pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan ibadah. Kecaman ini disampaikan Kiai An'im, yang juga putra pemimpin Lirboyo Kiai Mahrus Aly. Dia menilai standardisasi khatib ini merupakan bentuk intervensi negara terhadap kegiatan ibadah. “Negara sudah terlalu jauh turut campur,” kata Gus An'im-sapaan akrabnya – di Lirboyo, Rabu, 8 Februari 2017.

Menurut Gus An'im, urusan Khatib atau penceramah dengan umat merupakan prerogatif lembaga keagamaan. Hal itu juga merupakan wilayah manusia dengan Tuhannya atau Ubudiyah, yang tak bisa diatur oleh siapa pun, termasuk negara. Jika kemudian standardisasi diberlakukan kepada para penceramah, hal tersebut akan berpotensi menyempitkan ruang dakwah dan syiar agama.¹¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi positif wacana sertifikasi khatib yang dikeluarkan Menteri Agama Lukman Hakim. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, MUI bisa memahami gagasan Menteri Agama bila maksud dari sertifikasi itu memenuhi tiga poin. Pertama, program sertifikasi khatib tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dai. "Baik dari aspek materi maupun metodologi," kata Zainut dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Februari 2017.¹²

Jadi keharusan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam bidang penguasaan materi dan metodologi dakwah mutlak diperlukan oleh seorang dai agar benar-benar dapat menyampaikan pesan-pesan agama secara baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Kedua, program tersebut bersifat sukarela, bukan *mandatory* (keharusan atau kewajiban). Sebab, berdakwah itu hakekatnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang dan menjadi perintah agama. "Jadi kalau sertifikasi itu bersifat wajib, dikhawatirkan terkesan ada

¹¹ Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/844202/standardisasi-khatib-kiai-lirboyo-negara-sudah-terlalu-jauh/full&view>= diakses pada September 2018.

¹² (<https://m.tempo.co/read/843476/mui-tak-keberatan-pemerintah-sertifikasi-khatib-syaratnya/full&view>)

intervensi atau pembatasan oleh pemerintah. Hal ini justru akan menjadi kontra produktif bagi program tersebut," katanya.

Ketiga, program tersebut diselenggarakan oleh ormas Islam atau masyarakat, bukan oleh pemerintah. Pemerintah, kata dia, hanya bertindak sebagai fasilitator. Zainut mencontohkan, seorang calon dai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan akan diberikan sertifikat sesuai dengan jenjang diklatnya oleh ormas penyelenggara.

Adapun jenis, jenjang, materi dan metodologi pendidikan dan pelatihan bisa dirumuskan oleh masing-masing ormas Islam. Bisa juga Kementerian Agama menunjuk lembaga yang memiliki kompetensi di bidang itu bekerjasama dengan ormas Islam. "Sehingga ada standarisasi materi, metodologi dan sesuai dengan kebutuhan programnya," kata Zainut

Gagasan tentang perlunya standarisasi khatib (agaknya termasuk juga ustaz, mubaligh, dai, dan penceramah Islam lain) marak dalam pekan terakhir. Hal ini terkait dengan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang mengisyaratkan perlunya standarisasi khatib tersebut. Menurut Menag, wacana tentang ide atau gagasan tentang standarisasi khatib bukanlah baru; sebenarnya wacana itu adalah untuk merespons aspirasi yang berkembang di kalangan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh-tokoh umat sendiri. "Mereka ingin pemerintah juga ikut hadir dalam menjamin kualitas mutu khutbah Jumat yang menjadi bagi tak terpisahkan dari shalat Jumat," kata Menag (*Republika*, 1/2/2017).

Menag Lukman Hakim Saifuddin benar. Gagasan dan wacana tentang perlunya khatib memiliki standarisasi dan kualifikasi tertentu sudah ada sedikitnya sejak zaman Orde Baru. Bahkan juga ada suara-

suara yang mengusulkan tentang perlunya khatib dan juru dakwah lain memiliki semacam lisensi atau “SIM” untuk berkhotbah atau “SIK” (surat izin khotbah).

Tetapi jelas, berbagai gagasan tersebut tidak berhasil. Ormas-ormas Islam beserta lembaga dakwah dan para khatib beserta juru dakwah lain menentang gagasan tersebut. Karena itulah, sampai sekarang khatib dan juru dakwah lain bebas dan mandiri menyampaikan khotbah dan ceramah agama tanpa harus ada standarisasi atau kualifikasi tertentu apalagi SIK.

Menanggapi wacana yang kembali muncul dalam pekan terakhir ini, di dalam masyarakat khususnya pimpinan dan ormas dan juru dakwah (khususnya khatib) berkembang beragam pandangan yang pro dan kontra. Juga ada berkembang anggapan tentang indikasi usaha pemerintah-dalam hal ini Kemenag-untuk melakukan semacam “sertifikasi” khatib.

Dalam konteks terakhir ini, sekali lagi, sertifikasi dipahami kalangan pimpinan ormas Islam sebagai “lisensi” atau semacam “SIM khatib”. Tegasnya, khatib yang ingin memberi khotbah Jumat wajib mendapatkan lisensi atau “surat izin khotbah” (SIK) dari pihak berwenang semacam Kemenag-seperti disebut di atas.

Jika sertifikasi dalam bentuk semacam itu yang bakal dilakukan, kalangan ormas, lembaga dakwah, dan khatib banyak yang keberatan. Alasannya, sertifikasi semacam itu bukan hanya membatasi para khatib (dan juga juru dakwah lain), tetapi juga dapat menghilangkan kebebasan berdakwah. Padahal, Islam mengajarkan kewajiban berdakwah bagi setiap dan seluruh penganutnya.

Wajibnya khatib dan juru dakwah lain memiliki sertifikasi, sekali lagi, sebenarnya bukan hal baru. Kecuali Indonesia, hampir di seluruh negara di dunia Muslim khatib wajib memiliki lisensi (SIK). Sebagai contoh, lisensi khatib di Mesir diterbitkan Direktorat Jenderal Dakwah al-Azhar, di Malaysia dikeluarkan Jabatan Kebajikan Islam Malaysia (Jakim) atau lembaga kemuftian kerajaan negeri.

Untuk mendapatkan sertifikasi, khatib mesti memenuhi kualifikasi tertentu. Pertama-tama, mereka harus memahami bukan hanya ajaran Islam dalam berbagai aspeknya sesuai dengan pemahaman dan keislaman yang sudah disetujui ortodoksi dan otoritas agama resmi. Kekuasaan keagamaan ini lazimnya merupakan bagian integral kekuasaan negara. Tak kurang pentingnya, khatib mesti menguasai tata tertib khutbah, pendekatan dan cara menyampaikan khutbah, dan bahasa yang digunakan. Mereka juga harus mengikuti dan sesuai dengan kebijakan kekuasaan politik yang ada; tidak boleh ada kalimat atau pernyataan berbeda-apalagi menentang-penguasa atau kebijakannya.

Bukan sampai di situ. Di Malaysia, misalnya, khatib tidak dibenarkan menyampaikan khutbahnya sendiri. Sebaliknya, khatib harus atau tinggal membaca teks khutbah yang sudah disiapkan Jakim atau lembaga kemuftian kerajaan negeri. Karena itulah khutbah di negeri jiran ini wajib mengandung pujian dan doa bagi penguasa-terutama raja atau sultan-dan sekaligus dukungan terhadap kebijakan politiknya.

Implikasi kenyataan ini terhadap khatib dan juru dakwah jelas; dan itu sangat pahit. Di Mesir, misalnya, setelah berkuasanya kembali militer di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fatah el-Sisi (berkuasa sejak

Juni 2014), lisensi khutbah dan memberikan ceramah bagi pimpinan, anggota, dan simpatisan al-Ikhwan al-Muslimun dibatalkan al-Azhar. Alasannya, khatib-khatib Ikhwan ini menggunakan mimbar khutbah untuk provokasi politik melawan pemerintah militer.

Indonesia tak ragu lagi adalah medan dakwah yang bebas dan luas. Kebebasan itu sudah ada sejak zaman kesultanan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan pasca-kemerdekaan sampai sekarang. Para penguasa yang berbeda-beda sesuai masanya membiarkan khutbah dan ceramah agama tanpa banyak usaha mengendalikan dan membatasinya. Mengapa demikian? Khususnya zaman Belanda, para khatib dan juru dakwah lain sengaja menghindari diri dari menyampaikan khutbah politik, misalnya, menyerukan dari mimbar khutbah perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme Belanda. Khutbah lebih banyak diarahkan para khatib untuk memperkuat keimanan dan keislaman dengan berbagai lembaga Islam yang ada.¹³

Cendekiawan muslim menyambut baik wacana standarisasi khatib atau penceramah salat Jumat yang digulirkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, lantaran munculnya kerisauan terhadap isi ceramah yang menebar kebencian.

Masdar Mas'udi, yang menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, menilai standarisasi dan sertifikasi khatib salat Jumat mendesak diterapkan karena selama ini khatib "tidak berada dalam wadah tertentu yang terdisiplin" sehingga "sangat subyektif, suka-sukanya saja". "Karena itu, wacana standarisasi khatib ini penting

¹³<https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/02/08/011z48319-standardisasi-khatib-1>

supaya khotbah bisa menggambarkan wajah sejati Islam yang damai, yang menghormati sesama, bahkan berbeda agama sebagaimana disebutkan *Lakum Dinukum Waliyadin* atau *bagimu agamamu dan bagiku agamaku*," kata Masdar kepada BBC Indonesia.

Dalam pengamatannya, Masdar menilai ada sejumlah khatib yang isi khotbahnya "memprovokasi, menebar kecurigaan, kebencian kepada orang lain".

"Khatib-khatib yang semacam ini perlu dicatat dan dibina supaya agama Islam tidak berubah menjadi agama kebencian terhadap sesama hanya karena beda paham," ujar pria yang juga berpredikat sebagai salah satu pimpinan organisasi massa Islam, Nahdlatul Ulama.

Masdar mengakui upaya standarisasi khatib ini dapat menimbulkan kecurigaan umat Muslim bahwa negara hendak mengontrol khatib dan khotbah salat Jumat. "Kecurigaan bisa saja. Tapi, standarisasi khatib itu penting karena khotbah-khotbah tidak sedikit yang sifatnya memprovokasi, menebar kebencian kepada pihak lain yang tidak sepaham bahkan tidak seagama. Padahal, masyarakat kita sangat plural. Kalau itu dibiarkan, masjid-masjid dengan khotbahnya atau mimbarinya menjadi penebar virus kebencian, akan sangat berbahaya," kata Masdar.¹⁴

Dalam keterangan yang dimuat di laman Kementerian Agama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menepis anggapan bahwa negara berusaha mengintervensi khotbah Jumat. "Tidak ada maksud dari pemerintah ingin intervensi terhadap ajaran agama, atau membatasi ruang gerak khatib," ucap Lukman. Yang ingin dilakukan

¹⁴(<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38805823>)

pemerintah, lanjutnya, adalah memastikan khatib salat Jumat memenuhi kriteria keilmuan dengan istilah "dzu ilmin" atau memiliki ilmu karena "salat Jumat adalah kewajiban yang betul-betul harus dijaga syarat rukunnya".

Untuk itu, Kementerian Agama mengundang MUI, Muhammadiyah, NU, berbagai ormas Islam lainnya, juga beberapa fakultas perguruan tinggi keagamaan untuk merumuskan standarisasi tersebut. "Esensi khotbah Jumat itu kan mengajak, menasehati, dengan cara bijak dan arif. Sementara masukan yang kami terima, yang berkembang di lapangan, ada khatib-khatib yang khotbahnya penuh caci maki, mencela sana-sini. Khotbah sebagai media pembelajaran, bukan sebagai media politik praktis," ujarnya.

Menteri Agama tidak menyebutkan apakah pihaknya mempertimbangkan untuk memberi sanksi kepada khatib yang isi khotbahnya menebar kebencian. Namun, jika ada khatib yang menebar kebencian dalam khotbah salat Jumat, Masdar Mas'udi mengatakan tidak hanya masyarakat yang berhak menegur, tapi juga aparat bisa menindak dengan menggunakan undang-undang tentang ujaran kebencian. "Aparat boleh saja melakukan tindakan preventif terhadap khatib-khatib seperti itu," ujarnya. Pelaku ujaran kebencian dapat dijerat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman enam tahun penjara. Ada pula Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari lisensi seperti itu, namun juga bisa saja ada kerugiannya. Semua tergantung bagaimana metode dan tujuan dari diadakannya lisensi seperti itu.

Bagi masyarakat di Indonesia, lisensi itu bisa saja diperlukan, untuk menetapkan standar minimal agar seseorang layak menjadi khatib. Setidaknya, secara teori dia harus tahu apa yang menjadi syarat dan rukun khutbah, dan juga apa-apa yang membatalkan. Sebab masalah yang berkembang di negeri kita adalah kurangnya kualitas keilmuan dari para khatib. Maka kalau tujuan lisensi demi untuk standarisasi keilmuan, tentu sangat positif. Logikanya, jangan sampai orang yang tidak punya ilmu, mentang-mentang pintar ceramah, lantas dia seenaknya khutbah tanpa tahu syarat dan ketentuannya. Namun tentu harus diperhatikan metode dan cara pemberian lisensi itu, agar bisa berjalan dengan jujur, adil, transparan dan tidak ada unsur korupsi, manipulasi atau pun bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Dan juga jangan sampai ada kesan menghalangi dakwah. Bukan menghalangi tetapi melakukan standarisasi.

Sedangkan kalau negara-negara di Timur Tengah macam Mesir dan sejenisnya, lisensi itu memang bisa saja dimanfaatkan untuk meredam gerakan-gerakan yang melawan pemerintah. Hal itu mengingat bahwa nuansa pertentangan politik disana lebih marak dan dinamis. Seringkali masalah-masalah keributan perpolitikan terbawa-bawa sampai ke mimbar masjid. Pemerintah yang represif berhadapan dengan beragam gerakan yang progresif yang ingin menentangkan, maka segala cara bisa dimanfaatkan, termasuk melarang khutbah buat lawan-lawan politik.

Kalau kita melihat positifnya, lisensi itu paling tidak untuk mensterilkan mimbar khutbah Jumat dari jadi ajang perang propaganda perpolitikan pro atau anti pemerintah. Bukannya tidak boleh beroposisi, tetapi memanfaatkan mimbar Jumat yang seharusnya mengajak kepada persatuan dan perdamaian, serta meningkatkan iman kepada Allah, sekedar untuk ribut-ribut politik mendukung atau merongrong pemerintah, biar bagaimana pun tentu saja kurang tepat. Seharusnya gunakan mimbar bebas, lokasi demo, forum debat politik dan sejenisnya. Bukan memanfaatkan masjid atau shalat Jumat untuk hal-hal yang bisa melahirkan perdebatan politik. Dan perlu juga kita ketahui, larangan khutbah itu bila khatibnya tidak berlisensi itu terbatas hanya pada masjid-masjid yang memang secara struktural di bawah pengelolaan pemerintah. Jumlahnya memang cukup banyak, tetapi selain itu tetap masih banyak masjid yang independen.

Lain lagi ceritanya di Kerajaan Saudi Arabia. Bila mereka menerapkan lisensi buat para khatib, sebenarnya hal itu biasa dalam iklim mereka. Bukan apa-apa, para imam dan khatib memang banyak yang digaji oleh negara. Semacam pegawai negeri kalau disini.

Maka wajar kalau negara menerapkan syarat ini dan itu, agar seorang khatib bisa mendapatkan hak-haknya baik berupa gaji ataupun fasilitas lainnya. Saya tidak tahu bagaimana di Saudi, tetapi pengalaman saya ceramah di Qatar dan bertemu dengan para imam dan khatib termasuk muazzin disana, bisa memberikan sedikit gambaran. Di Qatar yang berbatasan dengan Saudi itu, para imam masjid bergaji sangat besar. Kalau dirupiahkan bisa ratusan juta sebulan. Belum lagi fasilitas rumah, mobil dan juga tiket gratis pulang pergi ke luar negeri

tiap tahun. Bahkan jatah cuti tahunan mereka sampai tiga bulan, yaitu dalam rangka liburan musim panas.

wawancara dengan salah seorang muazzin yang kebetulan dari Indonesia. Gajinya hampir 20-an juta bersih tiap bulan. Rumah, kendaraan, kesehatan sudah ditanggung, dan tentu saja tiket gratis liburan ke kampung halaman tiap tahun. Maka wajar sekali kalau negara yang membiayai para imam dan khatib ini menetapkan syarat-syarat tertentu agar mereka terdaftar dan berlisensi. Sebab kalau tidak memenuhi standar, bagaimana menjaga kualitasnya?

Memang tidak semua imam masjid secara otomatis tiba-tiba dapat gaji. Mereka harus terdaftar dulu sebagai imam dan khatib yang resmi, dan kalau lulus tes dan semua persyaratan, dan diangkat resmi menjadi 'pegawai negara', baru bisa dapat gaji.

Akan menjadi lucu sekali bila para imam dan khatib yang gajinya bergantung kepada negara, lantas ceramah dan khutbah mereka malah berlawanan dengan kebijakan negara. Apalagi kalau sampai mengagitasi para jamaah untuk menentang bahkan memusuhi kebijakan negara.

Secara logika akal sehat, kalau merasa tidak sejalan dengan negara, tentu para khatib dan imam ini harus memilih salah satunya. Mau berada dalam sistem atau memilih untuk melawan sistem. Jangan sampai mereka minta gaji tetapi memusuhi sistem dan menentang.

Maka para khatib dan imam yang punya idealisme dan kemandirian, umumnya memilih keluar dari sistem dan tidak takut miskin atau kelaparan. Buat mereka yang punya idealisme kukuh, menyampaikan isi nurani lebih utama dari sekedar gaji dan berbagai fasilitas lainnya. Tetapi yang jadi masalah, keberadaan imam dan khatib

di negara itu sepenuhnya atas izin dan tanggungan negara. Sebab banyak dari mereka yang sebenarnya bukan warga negara setempat, tetapi warga negara asing yang awalnya mendaftarkan diri untuk bekerja di negeri itu sebagai imam dan khatib.

Dan seperti umumnya para pekerja dari negara lain, semua terikat kontrak perjanjian, yang salah satu isinya melarang mereka untuk ikut campur urusan politik negara setempat, termasuk membuat provokasi atau sentimen aliran politik lainnya. Kalau perjanjian itu dilanggar, konsekuensinya bisa ditegur, dan bahkan bisa juga dideportasi dan dipulangkan, setidaknya kontraknya tidak akan diperpanjang.¹⁵

B. Syarat dan Ketentuan Khatib

Ada banyak kriteria yang patut dipenuhi oleh Khatib dalam berkhotbah antara lainnya:

1. memiliki akidah yang lurus, bertauhid yang benar;
2. hendaknya bersikap tenang dan berwibawa, tidak melanggar aturan-aturan Allah dan syi'ar-syi'arnya.
3. Mengetahui dengan baik hukum-hukum khutbah, hukum shalat sekaligus syarat dan rukunnya, pembatal-pembatalnya, pelengkap kesempurnaannya, serta tata cara pelaksanaannya.
4. Bicaranya (artikulasi) lencer, fasih dan mengalir, serta mampu mengungkapkan pikiran-pikirannya dengan baik, agar mudah dipahami bagi yang mendengarkan.

¹⁵Diunduh dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1378950430-perluakah-lisensi-buat-para-khatib-untuk-khutbah.html>) pada September 2018

5. Hendaknya menghindari kesalahan-kesalahan gramatika, unsur-unsur bahasa, keilmiahan serta kesalahan sejarah.
6. Materi yang disampaikan jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Tidak terlalu sepele bagi yang berpengetahuan dan tidak terlalu sulit bagi yang awam.
7. Khutbah yang disampaikan tidak terlalu panjang hingga membosankan dan menjenuhkan, akan tetapi ringkas dan sederhana. Hal itu agar tidak menghilangkan manisnya pendengaran, dan tidak sia-sia nilai keagungan yang diperdengarkan ke dalam hati mereka.
8. Khatib harus berusaha secara maksimal menukil hadis-hadis shahih dengan menjelaskan maknanya sesuai syari'at.
9. Khatib harus memperhatikan pendengar dalam memahami apa yang disampaikan kepada mereka.
10. Seorang khatib harus merasa sedang diawasi oleh Allah dalam hal yang diperintahkan-Nya, bukan merasa bahwa ia sedang diawasi oleh orang yang mendengarkannya.
11. Khatib hendaknya membagi khutbahnya menjadi beberapa bagian agar mudah dipahami oleh orang awam dan diterima orang-orang khusus.
12. Hendaknya khatib memotivasi jamaahnya dengan pahala dan menakut-nakuti dengan azab, memberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan sebagaimana al-quran memberikan pendidikan.
13. Khatib terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok isi khutbahnya sebaik mungkin agar dapat mencegah keraguan dalam gaya bahasanya.

14. Hendaknya Khatib tidak menjadikan para jamaah berputus asa dan patah semangat, sebaliknya ia harus membangkitkan ras optimis dan harapan kepada mereka.
15. Khutbah yang disampaikan hendaknya menyatukan dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek akal dan aspek hati agar menyentuk hati dan pikiran jamaah.
16. Khatib hendaknya bersikap lapang dada, berwajah ceria, penuh suka cita, bersemangat dan optimis serta menerima nasihat atau pendapat orang lain.
17. Hendaknya isi khutbah sesuai dengan realita ummat dengan berbagai problematikanya dan mengkaitkannya dengan peristiwa sejarah dan berupaya mengambil ibrah darinya.
18. Khatib harus pandai memilih tema dan pokok bahasannya, sehingga bermanfaat bagi pendengarnya.
19. Bagi khatib disunnahkan mengeraskan suaranya (lantang) ketika memberi nasehat, karena inti dari tujuan khutbah adalah memberi nasehat.
20. Apabila seseorang khatib melihat suatu kemungkaran atau hal yang bertentangan dengan syari'at ketika sedang berkhutbah, maka hendaknya ia menghentikan khutbahnya lalu ber amar ma'ruf nahi munkar.
21. Hendaknya tema khutbah sesuai dengan pokok-pokok pikiran atau kisi-kisi khutbah yang disampaikan sehingga benar-benar berfaedah bagi pendengarnya.
22. Isi khutbah sebaiknya berkaitan langsung dengan realitas kehidupan dan membahasnya hingga tuntas, sehingga mampu

menjadi solusi bagi persoalan hidup dan menjadi bekal mingguan bagi setiap muslim.

23. Khutbah jumat hendaknya tidak dijadikan sarana promosi atau propaganda untuk orang tertentu atau kelompok tertentu.
24. Seorang khatib seharusnya bersikap zuhud dari apa yang dimiliki oleh masyarakat dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT.
25. Di antara adab seorang khatib, seharusnya ia mengetahui dan mampu menjadi imam sekaligus Khatib pada shalat-shalat yang disyariatkan berkhotbah dan berjamaah seperti pada shalat dua hari Raya, shalat Gerhana matahari, bulan dan shalat istisqa' serta mengetahui cara-caranya.
26. Sebaiknya, seorang khatib tidak meniru gaya dan cara penyampaian orang lain, karena akan membosankan.
27. Sebaiknya khatib berusaha mendidik jamaah dan melakukan upaya perubahan sosial masyarakat secara bertahap, dengan cara baik dan benar.
28. Bagi khatib, tidak cukup hanya menginventarisasi problema masyarakat saja, melainkan memberikan tawaran solusinya dan penyelesaiannya.¹⁶

Dari uraian di atas ketentuan yang tidak dapat dipisah bagi Khatib adalah Kompetensi Khatib itu sendiri dan materi khutbah menyangkut prinsip dasar dan isi khutbah secara ideal. Setiap peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat dan pengirim informasi. Dalam hal ini sumber bisa disebut komunikator, pengirim,

¹⁶Su'ud bin Malluh bin Sulthan al-'Anazi, *al-Inba' bi aakhta'I al-Khutaba*, terj. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2008), h. 18-24

source, sender dan encoder. Dalam komunikasi dakwah sumber itu disebut da'i. efektivitas komunikasi dakwah selain dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi, diri komunikator juga akan memberikan kontribusi efektivitas tersebut. Untuk itu ada beberapa hal yang patut diperhatikan antara lain: etos komunikator dakwah dan sikap komunikator dakwah.¹⁷

Etos adalah nilai diri seorang komunikator yang meliputi 'kognisi, afeksi dan konasi'. Informasi dalam dakwah yang disampaikan komunikator kepada komunikan akan komunikatif bila terjadi proses psikologis yang sama antara da'i dan mad'u yang terlibat dalam proses tersebut (*in tune*). Adapun pendukung etos antara lain: Kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan dan kesederhanaan. Hal ini lebih banyak terfokus pada kepribadian diri sang Khatib agar komunikasinya efektif dalam menyampaikan khutbahnya. Etos Khatib merupakan karakteristik pribadi yang perlu dimiliki oleh mereka. Sebab, kepribadian seseorang sulit dipisahkan dari apa yang dikatakan, yang disampaikan dan yang dilakukan. Karena itu kompetensi diri, kapasitas keilmuan termasuk kecakapan berbahasa termasuk dalam etos Khatib.

Adapun yang juga tidak kalah pentingnya yaitu sikap atau *attitude* merupakan sebuah kesiapan kegiatan, suatu kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada lima yang sebaiknya menjadi sikap komunikator: *Reseptif, selektif, dijestif, assimilative* dan *transmisif*. Selain itu, seorang komunikator perlu

¹⁷ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja rosda karya, 2010), h.77-86

memiliki daya tarik (*source attractiveness*) dan kredibilitas sumber (*source credibility*). Daya tarik seorang da'i dan kredibilitasnya pun dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- Kompetensi menyelesaikan tugas yang dipersepsikan mengenai orang lain.
- Karakter, yaitu persepsi tentang moral, nilai-nilai dan integritas dari komunikasi.
- Koorientasi, yaitu derajat kesamaan yang dipersepsikan mengenai tujuan-tujuan dan nilai-nilai.
- Karisma, yaitu derajat kepercayaan akan kualitas kepemimpinan terutama dalam keadaan kritis dan menentukan.
- Dinamika, yaitu derajat tentang antusiasme dan perilaku-perilaku non verbal yang dipersepsikan.
- Jiwa sosial yaitu derajat keramahan yang dipersepsikan.

Selain itu, untuk komunikasi yang efektif perlu pengembangan kemampuan khusus meliputi: kemampuan analitis, kemampuan fleksibel dan kemampuan berkomunikasi. Asmuni Syukir menambahkan seorang da'i sepatutnya memiliki kepribadian khusus baik yang bersifat ruhani maupun jasmani. Kepribadian ruhani meliputi sifat-sifat, sikap dan kemampuan pribadi. Adapun sifat seorang da'i meliputi: Iman dan takwa kepada Allah, tulus ikhlas dan tidak mementingkan kepentingan diri pribadi, ramah dan penuh pengertian, tawadhu, sederhana dan jujur, tidak egois, antusiasme, sabar dan tawakkal, toleran, terbuka tidak memiliki penyakit hati. Adapun sikap seorang da'i meliputi: berakhlak mulia, ing ngarsa sung tulada, disiplin dan bijaksana, wira'i dan berwibawa, tanggung jawab, berpandangan

luas, berpengetahuan cukup. Adapun kepribadian yang bersifat jasmani antara lain: sehat jasmani dan berpakaian rapi.¹⁸

Jika seorang Khatib telah memiliki ketentuan-ketentuan ini, maka secara tidak langsung ia telah memenuhi standard an bisa diberikan sertifikatnya. Namun untuk mengidentifikasi apakah kriteria ini sudah dimiliki oleh semua Khatib yang ada di Negara ini maka perlu upaya pendalaman atau paling tidak dengan portofolio yang digunakan untuk mengetahui syarat dan kriteria tersebut.

C. Komunikasi Penyiaran Islam dan Peran institusional nya

Komunikasi Penyiaran Islam atau disingkat KPI merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Dakwah, fakultas dakwah dan Komunikasi, fakultas ilmu dakwah dan ilmu Komunikasi atau nomenklatur lainnya. Prodi ini merupakan prodi pertama saat fakultas Dakwah dibuka. Di berbagai PTKI di Indonesia KPI merupakan prodi pemula dan jargonnya bagi fakultas Dakwah.

Jurusan **Komunikasi dan Penyiaran Islam** (KPI) menawarkan studi ilmu komunikasi yang terintegrasi dengan penyiaran dan dakwah Islam. Sebagai wadah untuk studi ilmu komunikasi, kurikulum di Jurusan KPI memasukkan semua mata kuliah wajib yang disepakati dalam forum ASPIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi), seperti Ilmu Komunikasi, Teori Komunikasi, Filsafat dan Etika Komunikasi, Komunikasi Politik, Kumunikasi Antar Budaya, Desain Komunikasi Visual, dan sebagainya, sehingga

¹⁸ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar strategi dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.th).

kompetensi lulusan Jurusan KPI dapat disejajarkan dengan lulusan Jurusan/Program Studi Ilmu Komunikasi pada umumnya.

Namun, ada nilai lebih yang dimiliki oleh lulusan Jurusan KPI dibandingkan dengan jurusan ilmu komunikasi di tempat lain. Nilai lebih tersebut adalah penguasaan ilmu dan pendekatan keagamaan yang juga diajarkan di Jurusan KPI. Mahasiswa diberi bekal perspektif keagamaan yang akan sangat bermanfaat, baik untuk kehidupan pribadinya kelak maupun untuk studi dan karirnya ke depan sehingga lebih mampu memahami objek studinya di Indonesia, yang berpenduduk mayoritas Islam.

Studi di Jurusan KPI diorientasikan kepada dua konsentrasi, yaitu Konsentrasi **Jurnalistik** Konsentrasi **Broadcasting**. Konsentrasi **Jurnalistik** diarahkan untuk mencetak alumninya menjadi seorang wartawan handal, praktisi media, atau pun analis media massa. Untuk itu, selain mata kuliah dasar-dasar ilmu komunikasi, juga ditawarkan mata kuliah pendukungnya, antara lain adalah: Jurnalistik Cetak, Jurnalistik Online, Jurnalistik Investigatif, Hukum dan Etika Jurnalistik, Fotografi Jurnalistik, Reportase, Analisis Media, Penulisan Artikel, Penulisan Fiksi, Penulisan Feature, Manajemen Media Massa, Manajemen Redaksi, dan lain-lain.

Sementara Jurusan **Broadcasting** lebih diarahkan untuk mencetak sarjana yang handal dalam bidang penyiaran, baik radio maupun televisi. Mata kuliah pokok untuk itu antara lain: Hukum dan Etika Penyiaran, Jurnalistik Penyiaran, Reportase radio/TV, Newscasting, Editing Siaran Radio/TV, Sinematografi, Analisis Siaran Radio/TV, Produksi Acara radio/TV, Manajemen Siaran, dan sebagainya. Sebagai pendukung studi, selain fasilitas yang disediakan

oleh universitas seperti Perpustakaan Online yang memadai, jaringan internet dengan wi-fi yang handal, juga telah disediakan sebuah laboratorium “PPTD (Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah)”, yang menaungi Studi TV (Sunan Kalijaga TV), Studio Radio (Radio Siaran Dakwah), dan Lab Komputer dan Grafika.

Hasil kerja keras seluruh civitas akademika Jurusan KPI, hingga saat ini alumni Jurusan KPI telah diterima di berbagai sektor, baik sebagai PNS (baik di Kementerian Agama maupun di Pemerintah Daerah), juga telah tersebar mengabdikan diri di berbagai media massa, seperti TVRI, RRI, Indosiar, Trans7, MetroTV, berbagai Production House, Solo Pos, Radar, dan lain-lain.

Komunikasi Penyiaran Islam adalah jurusan komunikasi di perguruan tinggi Islam (PTI) seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), atau Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).

Pada dasarnya, KPI adalah jurusan Ilmu Komunikasi. Namun, karena ada di kampus Islam, namanya ditambah “Penyiaran Islam” sehingga menjadi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Di jurusan ini, mahasiswa dibekali ilmu dan keterampilan berkomunikasi untuk kepentingan syi’ar Islam (dakwah). Penyiaran Islam artinya penyebarluasan pesan-pesan keislaman. Bahasa Inggrisnya *Islamic Broadcasting* yang bermakna menyiarkan Islam di radio, televisi, dan film serta internet atau lembaga penyiaran Islami (radio, tv, dan film dakwah).

Berdasarkan kurikulum di jurusan KPI, mahasiswa belajar atau mendalami dua hal: Islam dan Komunikasi, yakni mendalami ilmu agama Islam dan keterampilan menyebarkannya melalui [media](#). Karenanya, mahasiswa KPI tidak hanya mendalami Al-Quran dan Al-Hadits sebagai

dua sumber utama ajaran Islam, tapi juga mempelajari keterampilan komunikasi, terutama jurnalistik dan penyiaran (broadcasting). Ada juga jurusan KPI yang dibagi menjadi dua program studi atau konsentrasi, seperti di [UIN Yogyakarta](#), yakni Broadcasting dan Jurnalistik. Dengan demikian, secara *de jure*, alumni KPI bukan saja menjadi ahli agama Islam, tapi juga menguasai ilmu jurnalistik dan penyiaran untuk mendakwahnya melalui berbagai media –cetak, elektronik, internet.

Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) menawarkan studi ilmu komunikasi yang terintegrasi dengan penyiaran dan dakwah Islam. Sebagai wadah untuk studi ilmu komunikasi, kurikulum di Prodi KPI memasukkan semua mata kuliah wajib yang disepakati dalam forum ASPIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi), seperti Teori Komunikasi, Komunikasi Antar Budaya dan sebagainya, sehingga kompetensi lulusan Jurusan KPI dapat disejajarkan dengan lulusan Jurusan/Program Studi Ilmu Komunikasi pada umumnya.

Namun, ada nilai lebih yang dimiliki oleh lulusan Prodi KPI dibandingkan dengan prodi ilmu komunikasi di tempat lain. Nilai lebih tersebut adalah penguasaan ilmu dan pendekatan keagamaan yang juga diajarkan di Prodi KPI. Mahasiswa diberi bekal perspektif keagamaan yang akan sangat bermanfaat, baik untuk kehidupan pribadinya kelak maupun untuk studi dan karirnya ke depan sehingga lebih mampu memahami objek studinya di Indonesia, yang berpenduduk mayoritas Islam.

Studi di Prodi KPI diorientasikan kepada dua konsentrasi, yaitu Konsentrasi Jurnalistik dan Konsentrasi Broadcasting. Konsentrasi

Jurnalistik diarahkan untuk mencetak alumninya menjadi seorang wartawan handal, praktisi media, atau pun analis media massa. Untuk itu, selain mata kuliah dasar-dasar ilmu komunikasi, juga ditawarkan mata kuliah pendukungnya, antara lain adalah: Jurnalistik, Hukum dan Etika Jurnalistik, Fotografi Jurnalistik, Reportase, Manajemen Media Massa dan lain-lain.

Sementara Broadcasting lebih diarahkan untuk mencetak sarjana yang handal dalam bidang penyiaran, baik radio maupun televisi. Mata kuliah pokok untuk itu antara lain: Hukum dan Etika Penyiaran, Jurnalistik Penyiaran, Reportase radio/TV, Newscasting, Editing Siaran Radio/TV, Sinematografi, Analisis Siaran Radio/TV, Produksi Acara radio/TV, Manajemen Siaran, dan sebagainya.

Sebagai pendukung studi, selain fasilitas yang disediakan oleh universitas seperti Perpustakaan Online yang memadai, jaringan internet dengan wi-fi yang handal, juga telah disediakan sebuah laboratorium “PPTD (Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah)”, Studio Radio (Radio Siaran Dakwah), dan Lab Komputer dan Grafika.

Hasil kerja keras seluruh civitas akademika Prodi KPI, hingga saat ini alumni Prodi KPI diharapkan diterima di berbagai sektor, baik sebagai PNS (baik di Kementerian Agama maupun di Pemerintah Daerah), juga telah tersebar mengabdikan diri di berbagai media massa, seperti TVRI, RRI, berbagai Production House, Radar, dan lain-lain. Secara kelembagaan, Prodi KPI telah terakreditasi oleh BAN-PT Kementerian Pendidikan Nasional.¹⁹

19

Dikutip

dari

http://metrouniv.ac.id/?page=konten&&cur=08a29aa74163df38a_64b0059bae11b83
12 Oktober 2018.

Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin secara resmi mengukuhkan pengurus Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS) dalam sebuah acara seminar internasional yang digelar pada, Selasa (07/03), bertempat di Auditorium Harun Nasution, kampus I UIN Jakarta. Menag didampingi Rektor UIN Jakarta Prof Dr Dede Rosyada MA, tidak hanya mengukuhkan asosiasi yang diinisiasi dan dibentuk oleh prodi KPI Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi saja, namun juga pada kesempatan tersebut hadir sebagai *keynote speaker* pada seminar internasional yang menyoal hoax tersebut.

Dalam sambutannya, Lukman mengatakan bahwa virus hoax kini langsung menyerang otak dan mengoyak nalar insani. Bila terpapar virus ini, orang akan mengalami *skizofrenia* informasi yang berujung luntarnya nurani. Maka akan musnah kebijaksanaan akal dan keluhuran budi seseorang yang telah menuhankan hoax,” • ujar Lukman. Lukman juga berharap, prodi KPI FIDK UIN Jakarta seyogyanya mampu menjadi contoh yang baik bagaimana menyikapi berita-berita hoax, kepada Prodi KPI yang ada di Indonesia. Sebelumnya, di tempat sama, rektor dalam sambutannya mengatakan, bahwa KPI UIN Jakarta merupakan prodi yang mampu menyedot banyak peminat dan sangat tinggi. Dengan demikian, KPI bukan lagi jurusan marjinal, tapi jurusan pilihan.

Sebagai informasi, pada mulanya ASKOPIS bernama Forum Komunikasi dan Penyiaran Islam Indonesia (FORKOPIS), yang dibentuk di Jakarta pada 19 November 2008. Tujuan pendiriannya yaitu sebagai wadah untuk komunikasi, akselerasi dan penguatan serta pemberdayaan Jurusan KPI. Pada perkembangannya, mengingat

hingga kini Jurusan KPI belum memiliki asosiasi atau forum resmi. Akhirnya, pada kongres yang diselenggarakan di UIN Yogyakarta Agustus 2016, disepakati perubahan nama menjadi yang semula FORKOPIS menjadi Asosiasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Se-Indonesia (ASKOPIS).

Selain sebagai wadah komunikasi KPI seluruh Indonesia, Asosiasi ini memiliki visi untuk membangun penguatan kapasitas institusional Jurusan KPI dengan mendorong kematangan intelektual, moral, dan sosial, sehingga dapat menjadi sebuah pusat (*center*) pemberdayaan civitas akademik KPI se-Indonesia.²⁰

Komunikasi penyiaran Islam merupakan implementasi dari dakwah, dimana Dakwah ialah suatu tugas suci yang diwariskan oleh Rasul Utusan Ilahi kepada penganut yang ta'at dan setia pada agamanya. Dakwah itu bersifat seni yang mempunyai ketentuan sendiri dan cara-cara sendiri.²¹ Pengertian dakwah dilihat dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari kata arab da'wah, yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Seruan dan panggilan dalam dakwah dapat dilakukan dengan suara, kata-kata atau perbuatan.

Sedangkan dakwah ditinjau dari segi terminology, mengandung beberapa arti yang beraneka ragam yang merupakan pendapat dari banyak ahli ilmu dakwah, mereka memberikan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing dalam memberikan pengertian pada istilah tersebut, sehingga antara definisi

²⁰Dikutip dari <https://www.uinjkt.ac.id/id/menag-kukuhkan-pengurus-askopis/> Oktober 2018.

⁹Abdullah Sungkar, *Kunci Sukses Da'wah Islam*, (Jakarta: PT. Arista Brahmadyasa, 1993), h.5

yang satu dengan yang lainnya sering terdapat perbedaan dan persamaan, yaitu sebagai berikut :

HSM. Nasarudin Latif, mendefinisikan dakwah ”setiap usaha aktivitas dengan tulisan maupun lisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil, manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah SWT. Sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah”.²² Hamka mendefinisikan dakwah “seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma’ruf nahi mungkar.”²³

Abu Bakar Zakaria mengatakan dakwah “usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan.”²⁴

Pada dasarnya dakwah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia baik dalam kehidupan mereka didunia maupun diakhirat. RB, Khatib Pahlawan Kayo dalam bukunya *Manajemen Dakwah*, mengungkapkan keberhasilan suatu kegiatan dakwah secara kuantitatif dapat diukur dengan standar dan kriteria sebagai berikut:

1. Kegiatan dakwah yang bertujuan untuk menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar* harus dilaksanakan bersama-sama

¹⁰Ali Aziz , *Op.Cit*, h.5

¹¹Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), h.2

¹²Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, *Op.Cit*, h. 11

(kelompok) secara terkoordinir dalam kesatuan organisasi yang kokoh, kuat dan rapi. Artinya kegiatan dakwah harus didukung oleh sejumlah organisasi dakwah yang kuat, karena dakwah akan gagal bila secara kuantitatif organisasi pendukungnya lemah.

2. Shalat sebagai pemegang fungsi terkuat yang membentengi diri agar terhindar dari tindakan-tindakan keji dan munkar, akan lebih *afdhal* bila dilaksanakan secara berjamaah. Falsafah shalat ini mengisyaratkan bahwa kekuatan jamaah untuk berdakwah harus diutamakan dari pada praktik dakwah sendiri-sendiri.
3. Jihad sebagai salah satu model kegiatan dakwah tidak hanya terfokus pada pertemuan saja, melainkan banyak sekali kegiatan lain yang digolongkan sama nilainya dengan jihad, seperti membela kebenaran dan keadilan dihadapan raja yang zalim, memelihara dan memuliakan kedua ibu bapak lebih-lebih dimasa tuanya, membela kepentingan fakir miskin dan anak-anak yatim, mempertahankan dan memelihara jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Kenyataan ini memberikan pesan bahwa lapangan gerak dakwah itu tidak satu, tapi sangat banyak dan luas. Artinya secara kuantitatif semakin luas jangkauan lapangan dakwah bermakna dakwah itu semakin baik. Begitu juga semakin banyak variasi kegiatan dakwah bermakna dakwah itu semakin sejuk dan merata.²⁵

¹³RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2007), h.87-88

Efektifnya sebuah proses dakwah akan sangat bergantung pada integrasi dari masing-masing komponen/unsur-unsur dakwah yang ada. Artinya jika masing-masing unsur dakwah itu berperan dengan baik maka dakwah akan efektif. Tetapi jika sebaliknya maka efektifitas dakwah pun hanya menjadi sebuah wacana. Apa saja unsur-unsur dakwah? Unsur-unsur dakwah antara lain:

1. Subjek dan Objek Dakwah

Berbicara masalah dakwah, maka tidak dapat dipisahkan dari subjek dakwah dan objek dakwah. Karena kedua komponen ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Subjek dakwah dinamakan da'i, da'i merupakan salah satu unsur penting dalam dakwah. sebagai pelaku dan penggerak kegiatan dakwah, da'i menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dakwah.

Subjek dakwah (da'i) adalah orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Da'i ini ada yang melaksanakan dakwahnya secara individu ada juga yang berdakwah secara kolektif melalui organisasi. Objek dakwah (Mad'u) adalah masyarakat atau orang yang didakwahi, yakni diajak ke jalan Allah agar selamat dunia dan akhirat.²⁶

Dalam melakukan aktivitas dakwah seorang da'i perlu mempunyai syarat-syarat dan kemampuan tertentu, agar bisa berdakwah dengan hasil yang baik dan sampai pada tujuannya. Persyaratan dan kemampuan yang perlu dimiliki oleh da'i secara umum bisa mencontoh kepada Rasulullah SAW, yang memang adalah

¹⁴Wahidin Saputra, *Op. Cit*, h.8

Nabi terakhir yang di tunjuk oleh Allah untuk menjadi contoh bagi umat-Nya. Adapun syarat-syarat dan kemampuan secara teoritis yang harus dimiliki oleh seorang da'i adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan berkomunikasi
- b. Kemampuan menguasai diri
- c. Kemampuan pengetahuan psikologi
- d. Kemampuan pengetahuan pendidikan
- e. Kemampuan pengetahuan bidang umum
- f. Kemampuan dibidang Al-Qur'an
- g. Kemampuan membaca Al-Qur'an dengan fasih
- h. Kemampuan pengetahuan dibidang hadist
- i. Kemampuan dibidang agama secara umum.²⁷

Bagi da'iyah diharuskan mempunyai berbagai macam karakteristik sebagai berikut (dan karakter ini pun harus pula dimiliki para da'i):

- a. Tahu dengan apa yang didakwahkan. Seorang tak mungkin bisa mendakwahkan sesuatu jika dia tidak tahu apakah masalah itu termasuk syariat atau tidak, apakah itu termasuk ibadah atau adat, apakah itu masalah yang berkaitan dengan *din* atau *taqlid* (kepada warisan nenek moyang dan sebagainya).
- b. Dia sebagai *qudwah* (penuntun) yang baik. Jangan sampai kita memerintahkan dengan lisan, tetapi perbuatan kita berlawanan dengan apa yang dikatakan.

¹⁵Slamet Muhaemin Abda, *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), Cet.ke-1, h.69

- c. Berakhlak baik, *tawadhu'* serta lemah lembut. Menyenangkan orang lain agar dakwah mudah diterima, menyesuaikan metode yang dipakai terhadap mad'u dan tidak boleh menghadapi mad'u dengan kesombongan.
- d. Memperhatikan penampilan. Memperhatikan penampilan terutama penampilan luar, seperti busana dan sebagainya.
- e. I'tidaal (sederhana). Sederhana dalam segala sesuatu, tidak menjadikan hina (kekurangan) dan tidak juga berlebihan.²⁸

Demikian syarat-syarat yang harus dimiliki seorang da'i supaya dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya dapat tepat sasaran. Karena sasaran dakwah bermacam-macam, baik dari segi usia maupun tingkat pemahaman mad'u yang sangat mempengaruhi dalam menangkap isi pesan yang disampaikan oleh da'i. Hendaklah seorang da'i harus mampu memahami siapa saja yang menjadi mad'unya dalam aspek kehidupannya secara utuh.

2. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah adalah tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan dakwah itu sendiri. Adapun tujuan dakwah itu dibagi dua yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dalam dakwah dimaksudkan agar manusia mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya manusia yang berakhlak mulia, dan tercapainya individu yang baik, keluarga yang sakinah atau harmonis, komunitas yang tangguh, masyarakat madani dan pada akhirnya akan membentuk

¹⁶Syaikh Salman Bin Fadh Al-Audah, *Suka Duka Da'iyah*, (Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1994), h.35-44

bangsa yang sejahtera dan maju.²⁹ Tujuan dakwah jangka panjang adalah memimpin dunia.

Demikian tujuan dakwah yang pada intinya adalah merubah sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok supaya kembali pada pola dasarnya, bahwasanya manusia hidup didunia ini untuk menyembah Allah SWT.

3. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu seluruh ajaran Islam yang ada didalam Kitabullah maupun sunnah Rasul-Nya.³⁰ Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisikan ajaran Islam. Secara konseptual pada dasarnya materi dakwah Islam tergantung pada tujuan dakwah yang hendak dicapai. Namun, secara global materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tiga pokok, yaitu:

1. Masalah keimanan (aqidah)
2. Masalah keislaman (syariat)
3. Masalah budi pekerti (akhlaqul karimah).³¹

Masalah keimanan adalah pokok kepercayaan dalam agama Islam atau yang sering disebut tauhid. Dalam Islam masalah keimanan mencakup masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun iman. Masalah keIslaman adalah seluruh hukum yang ada dalam agama

¹⁷Wahidin Saputra, *Op.Cit*, h.9

¹⁸Hafi Anshari, *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h.140

¹⁹Samsul Munir Amin, *Op.Cit*, h.89

Islam, baik yang berhubungan manusia dengan Tuhan, maupun antarmanusia itu sendiri. Masalah keislaman berhubungan erat dengan amal nyata, dalam rangka menaati semua peraturan atau hukum Allah, guna mengatur hubungan antarmanusia dengan Tuhan-Nya dan mengatur antar sesama manusia. Masalah budi pekerti adalah mengenai aktivitas dakwah sebagai materi dakwah merupakan pelengkap keimanan dan keislaman seseorang. Meskipun hanya pelengkap, budi pekerti merupakan penyempurna keimanan dan keislaman seseorang.

4. Metode Dakwah

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan.³² Metode dakwah berkaitan dengan peranan dakwah dalam meningkatkan pemahaman agama bagi mad'u harus dilakukandengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa

²⁰Ali Aziz , *Op.Cit*, h.123

yang tersesat dari Jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125).³³

Ayat diatas memberikan pedoman cara dakwah yang harus dilakukan, yaitu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdiskusi dengan cara yang baik.

a. Hikmah

Kata hikmah sering kali diterjemahkan dalam pengertian bijaksana, yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, konflik, maupun rasa tertekan.³⁴

Adapun pengertian Hikmah menurut Marsekan Fatwa, Hikmah adalah dakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka sehingga didalam menjalankan ajaran Islam tidak merasa terpaksa atau keberatan.³⁵

Selanjutnya adapula pengertian himkah menurut Syekh Abdurrahman Abdul Khalid dalam bukunya *Strategi Dakwah syar'iyah*, menyatakan bahwa:

Hikmah adalah kaidah-kaidah dan azaz-azaz agung yang diterangkan Allah dalam kitab-Nya serta diterangkan Rasul-Nya ketika beliau diangkat dengan hikmah pula. Tujuan sikap hikmah adalah meletakkan setiap perkara

²¹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.224

²²Samsul Munir Amin, *Op.Cit*, h.98

²³Ali Aziz , *Op.Cit*, h.157

pada proporsinya yang tepat serta dapat mencapai sasaran dengan mudah hanya dengan sedikit pengorbanan.³⁶

b. Nasihat yang baik

Nasihat yang baik maksudnya adalah memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk kearah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, menyentuh perasaan, lurus di pikiran, menghindari sikap kasar, dan tidak mencari atau menyebut kesalahan mad'u sehingga pihak objek dengan rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah.³⁷

Penerapan metode dakwah dengan nasihat yang baik, antara lain dapat dilakukan dengan :

- a. Memberikan nasehat dengan kata-kata mendatar, maksudnya kata-kata yang ditujukan kepada masyarakat harus datar, sejuk, dan menyentuh.
- b. Memberikan nasehat dengan kata-kata heroik, dalam bentuk kata-kata perjuangan dengan penuh semangat dan keberanian guna menekan kekuatan-kekuatan misi Islam.
- c. Memberikan nasehat dengan cara mengungkapkan pernyataan, pernyataan yang diungkapkan ditujukan

²⁴Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq, *Strategi Dakwah Syar'iyah*, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1996), h. 107

²⁵Samsul Munir Amin, *Op.Cit*, h.99

kepada para pengikut yang tidak beraksi atas ajakan para mubaligh untuk kembali pada ajaran islam

- d. Memberikan instruksi atau perintah, dilakukan oleh da'I yang memiliki posisi sebagai pemimpin lembaga atau ormas dan lain sebagainya
- e. Menceritakan kisah, menceritakan kisah dijadikan cara untuk menyampaikan pesan-pesan Islam oleh para mubaligh, terutama ketika memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya
- f. Memberikan kritik, diartikan sebagai kritik para da'i terhadap umat Islam yang melakukan penyebaran agama dengan cara yang tidak positif.³⁸

c. Berdiskusi dengan cara yang baik

Diskusi adalah menyampaikan dakwah dengan topik tertentu dengan cara pertukaran pendapat diantara beberapa orang dalam suatu pertemuan. Berdakwah dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran terhadap sesuatu masalah dalam materi dakwah. Asmuni Syukri mengartikan diskusi sebagai penyampaian materi dakwah dengan mendorong sasarannya untuk menyatakan

²⁶Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 84-109

suatu masalah yang dirasa belum dimengerti dan da'inya sebagai penjawab.³⁹

Metode dakwah dengan diskusi biasanya dilakukan pada golongan mad'u yang tingkat kecerdasannya dalam kategori pertengahan antara golongan awan dan golongan yang tingkat kecerdasannya tinggi. Metode diskusi ini jika dibandingkan dengan metode lainnya memiliki kelebihan, antara lain:

- 1) Suasana dakwah akan tampak hidup, sebab semua peserta mencurahkan perhatian kepada masalah yang sedang didiskusikan.
- 2) Dapat menghilangkan sifat-sifat individualistic dan diharapkan akan menimbulkan sifat-sifat yang positif, seperti toleransi, demokratis, berfikir sistematis dan logis.
- 3) Materi akan dapat dipahami secara mendalam.⁴⁰

Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Diantaranya menggunakan metode Komunikasi Islam. Dakwah dalam kacamata komunikasi merupakan sebuah aktifitas menerangkan, menyampaikan pesan ajaran Islam secara kaffah, sehingga orang yang diberi pesan dan informasi dapat terpengaruh dan selanjutnya dapat merubah perilakunya secara islami. Perkembangan selanjutnya kata dakwah juga dipakai oleh masyarakat di luar Islam untuk berjuang (provokasi dan agitasi) atau mengajak umatnya dalam menyeru kebaikan serta memperkuat akidahnya. Dakwah yang demikian merupakan bentuk komunikasi yang dipergunakan oleh

²⁷Ali Aziz , *Op. Cit*, h.172

²⁸Ali Aziz , *Ibid*, h.173

agamawan dengan memaknai bahwa pentingnya keberadaan dakwah dalam keberlangsungan umat dan kehidupan manusia sepanjang masa. Dakwah dalam konteks komunikasi Islam adalah strategi atraktif persuasif. Artinya kegiatan penyampaian pesan dikemas semenarik mungkin dengan gaya dan model inovatif, melalui aktifitas nyata dalam dimensi tabligh, sehingga membawa dampak positif bagi akselerasi penyebaran agama serta perkembangan kuantitas umat Muslim secara nyata. Implikasi dakwah dalam konsep komunikasi Islam, berarti merumuskan konsep sistematisasi dakwah islamiah.⁴¹

Kecenderungan negative yang terjadi pada mahasiswa KPI perlu diantisipasi dengan meningkatkan religiositas mahasiswa, diantaranya membuat aktif dalam kegiatan keagamaan sebagaimana hasil penelitian hasil penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih meningkatkan dan memperbaiki kualitas religiositasnya agar dapat membantu mengurangi tingkat kecenderungannya untuk menderita Internet Addiction Disorder. Adapun untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi diharapkan juga dapat lebih menguatkan kurikulum yang mendukung religiositas, sehingga memberikan kemantapannya terhadap religiositasnya, apalagi banyak dari mahasiswa yang berlatarbelakang dari pendidikan umum. Sehingga porsi keilmuan tentang agama sangat minim pada mahasiswa.⁴²

⁴¹ Hasanah, Hasyim, and U. I. N. Walisongo. "Arah Pengembangan Dakwah Melalui Sistem Komunikasi Islam." *At-Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 4.

⁴² Basri, A. "Kecenderungan Internet Addiction Disorder Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Ditinjau Dari Religiositas." *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga* 15.2 (2014): 407-432.

d. Tujuan komunikatif Khutbah

Khutbah merupakan uraian, keterangan dan pandangan yang mengandung aspek nasihat bersumberkan ajaran Islam dijiwai semangat ketakwaan yang dilaksanakan menjelang shalat jumat dengan syarat yang telah ditentukan. Khutbah mempunyai ciri-ciri tertentu diantaranya terletak pada tempat, waktu dan suasana, lebih penting lagi khutbah jumat berfungsi sebagai media pembinaan umat yang regular, normative dan efektif.

Dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menggambarkan tentang proses komunikasi. Salah satunya adalah dialog yang terjadi pertama kali antara Allah swt., dan malaikat. Ini dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah: 30:

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.» Mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.» (QS. Al-Baqarah: 30).

Komunikasi dakwah menyemaikan pesan keagamaan dalam berbagai tatanan komunikasi atau model komunikasi agar orang lain yang menjadi sasaran dakwah dapat terpenggil akan pentingnya Islam dan ajarannya dalam dunia ini. Di antara tatanan komunikasi yang dapat diimplementasikan pada dakwah, yaitu tatanan komunikasi antar pribadi, kelompok dan public. komunikasi dakwah hampir sama dengan komunikasi pada umumnya, tetapi yang membedakan antara keduanya hanya pada cara dan tujuan yang akan dicapai.

Tujuan komunikasi pada umumnya yaitu mengharapkan partisipasi dari komunikan (mad'u) atas ide-ide atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator (da'i) sehingga pesan-pesan yang disampaikan tersebut terjadilah perubahan sikap dan tingkah laku yang diharapkan, sedangkan tujuan komunikasi dakwah yaitu mengharapkan terjadinya perubahan atau pembentukan sikap atau tingkah laku sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran Islam.

Salah satu media dakwah dalam agama Islam adalah melalui khutbah Jumat merupakan ritual ke agamaan yang memiliki jangka waktu yang relatif sering dilakukan yakni seminggu sekali. Khutbah Jumat dijadikan sebagai sarana untuk membangkitkan iman dan taqwa umat Islam khususnya kaum laki-laki wajib baginya menjalankan shalat Jumat.

Pelaksanaan sholat Jum'at merupakan karakteristik miniatur masyarakat yang islami. sekaligus sebagai ciri khas dan karakter umat muslim sebenarnya. dalam sholat Jum'at diliputi dengan penuh pensucian, pengagungan dan ganjaran pahala yang tinggi. Maka, ketika adzan dikumandangkan maka setiap manusia segera bergegas menuju mMsjid dan sejenak meninggalkan segala bentuk aktifitas untuk melaksanakan sholat Jum'at. Ada kandungan ayat Al – Qur'an menerangkan tentang kewajiban melaksanakan perintah sholat Jum'at dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 9:

Hai orang – orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka besegeralah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. (QS. Al Jumu'ah: 9)

Kewajiban ibadah jum'at mulai disyariatkan pertama kali semenjak turunya surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu di Madinah. Perihal

tempat diturunkanya ayat tersebut tidak dipersilihkan. Dengan demikian, mulai ditetapkanya sholat jum'at itu di Madinah bukan di Mekkah.

Persoalannya, Dalam pemahaman bahasa, setiap manusia pasti memiliki keterbatasan dalam menangkap informasi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Ada masyarakat yang masih awam, pintar atau pun yang belum bisa baca tulis. Ini suatu kekhawatiran mungkin khatib pada solat Jum'at harus bisa pintar – pintarnya dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada para jama'ah. Agar pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh masyarakat. Sedangkan, apakah menggunakan bahasa Arab ketika menyampaikan khutbah itu salah satu metode yang pas dan bisa langsung dapat diterima pesan – pesan keagamaan? Sebab itu, sangat rasional bila peserta Jum'at itu perlu mengerti kandungan dan isi khutbah. Itulah sebabnya sebagian ulama memandang boleh saja khutbah disampaikan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh jama'ahnya. Adapun, kalimat hamdalah, syahadat, sholawat dan do'a itu hanya sebagai kesempurnaan dalam khutbah.

Komunikasi yang cakap atau cerdas dalam al-qur'an diistilahkan dengan qaulan karima, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan sadida dan qaulan maysura. Untuk mencapai itu, prinsip-prinsip yang perlu disikapi baik oleh komunikator maupun komunikan harus simultan, karena masing-masing memiliki peran yang saling mengisi dan saling melengkapi. Menurut Abu darda, misalnya, prinsip pertama adalah manis tutur kata dan inklusif. Tutur kata yang manis merupakan daya tarik tersendiri dalam berkomunikasi, karena dalam pepatah dikatakan barang siapa yang manis tutur katanya

maka banyak temannya. Bahkan penggunaan kata “kita” akan lebih menciptakan suasana akrab dari pada kata “mereka”, atau “kamu”, termasuk di dalamnya adalah menghindari kata-kata atau istilah yang dapat menyinggung perasaan komunikan, seperti pantangan suatu adat atau daerah tertentu, kata-kata jorok, porno, seronok, dan sejenisnya. Selain itu, prinsip yang perlu diperhatikan adalah kontroling terhadap ucapan dan perilaku. Control ucapan maksudnya adalah, mengontrol ucapan sebelum berbicara, apakah dapat menimbulkan ketersinggungan orang lain atau tidak. Dalam pepatah disebutkan, al-kalamu yanfuzu ma la tanfuzu alibaru : perkataan itu dapat menembus apa yang tidak tertembus oleh jarum.⁴³

Tujuan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 257, “Allah Pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa seseorang yang ingkar pada Thagut dan beriman kepada Allah, maka ia berpegang pada tali yang amat kuat dan tidak akan putus, tujuan dakwah tersebut sangat sejalan dengan pengertian dakwah yang dikemukakan oleh Bakhyul Khûlî dalam karyanya *Tadzkirat al-Du’ât*, yaitu dakwah adalah memindahkan manusia dari suatu situasi ke situasi yang lain. Tentunya dari situasi negatif ke situasi positif atau dari yang positif kepada yang

⁴³ Syarifuddin, A. "DAKWAH KOMUNIKATIF, KENAPA TIDAK?." *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 16.1 (2015): 53-62.

lebih positif lagi. Menurut al-Raghib al-Ishfahânî, istilah *zhulumât* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu pertama kegelapan, dan kedua kebodohan, kemusyrikan dan kefasikan. Makna kedua menurutnya dapat dilihat dalam Q.S. Ibrâhîm/14:5. Muhammad ‘Alî al-Shabunî melihat bahwa lafaz *zhulumât* yang terdapat pada ayat 1 dan 5 surah Ibrâhîm bermakna kebodohan, kesesatan dan kekafiran.

Penafsiran yang lebih elaboratif berasal dari Sayyid Quthb, dia menafsirkan lafal *zhulumât* pada ayat 1 surah Ibrâhîm dengan “kegelapan akibat angan-angan, kegelapan yang berpangkal pada tradisi, kegelapan akibat politeistis, kegelapan akibat kerancuan tata nilai dan pertimbangan-pertimbangan.” Dalam ayat lain disebutkan bahwa pengutusan Rasul untuk mengemban tugas yang sama yaitu mengeluarkan manusia dari belenggu kegelapan kepada cahaya Allah. Allah berfirman dalam Q.S. Thalâq/65: 11 “(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh dari kegelapan kepada cahaya...” Selanjutnya, di ayat lain diinformasikan tentang Allah memberikan kitab kepada nabi-Nya, dengan kitab ini manusia akan dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Firman Allah dalam Q.S. al-Mâidah/ 5: 16, “Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” Sebagai tambahan, Allah berfirman dalam Q.S. al-Hadîd/ 57: 9 “Dia-lah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (al-Qur’an)

supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya... “ Mengeluarkan manusia dari situasi kekafiran kepada cahaya ketuhanan menandai terutusnya Rasul-rasul Allah. Di saat syariat agama yang dibawa oleh seorang Rasul, karena perjalanan waktu, mulai redup dan umat mulai terperosok ke dalam kegelapan, maka Allah mengutus Rasul yang baru untuk membawa mereka kepada cahaya ketuhanan. Kemunculan agama Yahudi tidak lepas dari upaya ilahi menunjuki manusia ke arah kehidupan sesuai dengan hidayah Allah setelah ajaran yang dianut masyarakat telah dirasuki dengan berbagai paham-paham yang mengaburkan prinsip-prinsip agama yang benar.

Dalam kasus yang sama, kemunculan agama Nasrani sesungguhnya dimaksudkan untuk menolong manusia yang telah menyimpang jauh dari syariat yang terdapat dalam agama Yahudi. Dalam pentas sejarah, Nabi Isa as. telah memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat dalam kehidupan yang penuh cinta kasih. Sebagai tambahan, kasus serupa, kedatangan agama Islam, pada hakekatnya untuk menyelamatkan manusia yang hanyut dalam arus jahiliyah. Dalam konteks historisnya, Nabi Muhammad SAW. telah menunjukkan usaha keras dan tidak mengenal lelah melepaskan manusia dari cengkeraman jahiliyah menuju kehidupan yang penuh rahmat dalam genggaman Islam.⁴⁴

Selain itu, khutbah bertujuan untuk menegakkan fitrah insaniah. Landasan teologis tujuan ini adalah Q.S. al-Rûm/30: 30 “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah),

⁴⁴ Jafar, Iftitah. "Tujuan Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus dan Orientasi Dakwah Ilahi." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 34.2 (2010).

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” Menurut Muhammad Asad, termafitrah berarti kecondongan alami, melukiskan kemampuan intuitif untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang haq dengan yang bathil, hingga makna keesaan dan eksistensi Tuhan. Dalam hadis riwayat Bukharî Muslim disebutkan “Setiap anak yang lahir dilahirkan menurut fitrahnya, orang tuanyalah yang menyebabkandia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi.” Dalam pandangan Muhammad Asad, ketiga formulasi agama ini, sangat dikenal pada zaman Nabi, adalah mereka yang dikontraskan dengan “disposisi alami” yang terdapat dalam kognisi instinktif pada Tuhan dan penyerahan diri (Islam) kepada-Nya. Terma “orang tua” di sini memiliki makna yang lebih luas yaitu pengaruh sosial (*social influence*) atau lingkungan (*environment*).

Selanjutnya, khutbah bertujuan memotivasi untuk beriman. Artinya bahwa khutbah bertujuan untuk mengantarkan obyek dakwah (mad’û) untuk beriman kepada Allah dan mengesakan-Nya. Dalam bingkai akidah islamiyah dikenal dua pengesaan kepada Allah. Pertama, pengesaan Allah dalam arti meyakini bahwa pencipta alam semesta dan segala isinya adalah Allah SWT. Pengesaan seperti ini disebut tauhîd rubûbiyah. Kedua, pengesaan Allah dalam arti hanya tunduk, taat dan pasrah kepadaNya. Pengesaan ini disebut tauhîd ulûhiyah atau tauhîd ilâhiyah.²³ Dasar tujuan dakwah ini adalah firman Allah dalam Q.S. al-Fath/48: 8-9 “Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan

(agama)-Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” Nilai dan aspek dakwah dalam ayat ini terwakilkan dalam fungsi rasul sebagai pembawa berita gembira (mubasysysiran) dan pemberi peringatan (nazîran). Sementara ungkapan “litu’minû billâhi wa rasûlih” yang mencerminkan tujuan dakwah yang akan dicapai, yaitu agar manusia mempercayai Tuhan dan Rasul-Nya dengan iman yang baik, keimanan yang tegak di atas keyakinan, tidak mengandung persangkaan dan keraguan.

Tujuan khutbah lainnya adalah memotivasi untuk beribadah yakni mendorong dan memotivasi orang agar beribadah kepada Tuhannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 21 “Hai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.” Al-Thabathaba’î mengemukakan munasabah ayat ini sebagai berikut: ayat terdahulu menjelaskan posisi tiga kelompok yaitu orang saleh yang selalu mendapat petunjuk dari Tuhan, orang kafir yang hati, telinga dan matanya tertutup, dan orang munafik yang terdapat penyakit dalam hatinya dan Allah menambah penyakit tersebut, sehingga mereka bisu tuli. Pada ayat ini, Allah memanggil manusia untuk menjadi hamba yang baik, menyembah-Nya, bukan terhadap orang kafir dan munafik tetapi kepada orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah SWT.

Dengan demikian bahwa tidak ada satu pun tujuan khutbah yang ingin membuat keresahan audiens nya. Artinya, apabila setelah mendengarkan khutbah lalu audiens (pendengar) jadi terdorong

melakukan kejahatan, anarkisme, terorisme maka ia telah keluar dari ketentuan yang telah digariskan.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah selayang Pandang

Fakultas Dakwah dan Komunikasi awalnya bernama Fakultas Dakwah. Keberadaan Fakultas Dakwah sendiri tidak terlepas dari Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang, dimana sejak tahun 1976 Fakultas Ushuluddin telah mengembangkan jurusan yang sebelumnya hanya ada satu jurusan saja, yaitu jurusan Perbandingan Agama, ditambah satu jurusan yaitu Dakwah.⁴⁵

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan adanya pengembangan fakultas di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang untuk menambah berbagai disiplin ilmu sebagai pelengkap keilmuan yang berhubungan dengan agama Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, menjelang tahun akademik 1995/1996, Fakultas Ushuluddin jurusan Dakwah membentuk program studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).

Sebagai langkah awal untuk pendirian Fakultas Dakwah, maka dilaksanakanlah rapat senat Fakultas Ushuluddin pada tanggal 23 Februari 1995. Dari hasil rapat tersebut ditetapkan Tim Persiapan Pendirian Fakultas Dakwah dengan SK Dekan Nomor :

⁴⁵ J. Suyuthi Pulungan Dkk, *Buku Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah*, (Palembang: UIN Raden Fatah Press, 2001), h. 193

IN/4/III.2/PP.07.660/1995 Tanggal 16 Februari 1995 dengan panitia sebagai berikut:

Ketua : Drs. Komaruddin Sahar,
Sekretaris : Drs. Taufik Yusuf,
Anggota : Drs. H.M. Yamin Maris, Drs. H. Abdullah Yahya, Drs. Thohlon Abdul Rauf, Drs. Saifullah Rasyid, MA, Drs. Turmudzi DS.⁴⁶

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 1995 Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang kembali mengadakan sidang senat dengan hasil keputusan bahwa pada tahun akademik 1995/1996 mahasiswa yang akan mendaftar jurusan dakwah adalah sebagai mahasiswa program studi KPI dan BPI. Mahasiswa inilah yang merupakan cikal bakal mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang.

Upaya untuk mendirikan Fakultas Dakwah selanjutnya yaitu dengan membentuk pengelola program sebagai berikut:

Ketua pengelola : Drs. Komaruddin Sahar,
Sekretaris : Drs. H.M. Kamil Kamal,
Anggota : Drs. H. Thohlon Abdul Rauf, Drs. Basyaruddin Hamdan, Drs. Asmawi.⁴⁷

Sebagai usaha untuk mempercayai proses pendirian Fakultas Dakwah di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang, dibentuklah Tim gabungan pendirian Fakultas Dakwah dan Adab, dengan SK Rektor Nomor: XXXIII tahun 1995. Personelnya sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, h. 194

- Ketua : Drs. H.M. Yamin Maris
Sekretaris : Drs. H. Saifullah Rasyid, MA
Anggota : 1. Drs. H. Ali Ahmad Zen
2. Drs. Komaruddin Sahar
3. DR. J. Suyuthi Pulungan, MA

Dalam pertemuan tim gabungan tersebut dengan Rektor IAIN Raden Fatah Drs. Moh. Said, MA., disepakati bahwa kedua Fakultas yang akan didirikan itu hendaklah mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya dan menyusun proposal untuk dikirim ke Menteri Agama RI guna merealisasikannya.

Langkah berikutnya tim menyebarkan angket ke pesantren-pesantren serta MAN/Mas yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Disamping itu, dilaksanakan juga studi banding ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 1-9 Desember 1995. Dari Fakultas Dakwah diwakili oleh Drs. Komaruddin Sahar dan Drs. H. M. Kamil Kamal. Kesemuanya dilakukan dalam rangka studi kelayakan berdirinya Fakultas Dakwah.⁴⁸

Berdasarkan hasil angket dan studi banding yang telah dilaksanakan tersebut, maka dibuatlah proposal dan kemudian diajukan kepada Menteri Agama RI. Di samping itu, Rektor IAIN Raden Fatah telah mengeluarkan SK No. B/II-i/UP/212/1997 tentang Struktur Badan Pengelola Persiapan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang, yakni sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid*

Ketua : Dr. Aflatun Muchtar, MA
Wakil Ketua : Drs. Komaruddin Sahar
Wakil Ketua : Drs. H. M. Kamil Kamal
Anggota : 1. Mirwan Fasta, S.Ag
2. Ahmad Darmawan

Pada tahun akademik 1997/1998 Badan Pengelola Persiapan Fakultas Dakwah mulai mempersiapkan jadwal kuliah. Di samping itu, dosen-dosen Fakultas Ushuluddin mengadakan konsolidasi dengan para mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah angkatan 1995/1996 dan 1996/1997 dengan membagi dua jurusan yaitu Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).

Pada tanggal 27 Februari 1998 dengan SK Menteri Agama RI No. 103 Tahun 1998 berdirilah Fakultas Dakwah di IAIN Raden Fatah Palembang dan baru diresmikan oleh Rektor IAIN Raden Fatah pada tanggal 13 Juli 1998.⁴⁹

Berdasarkan SK Rektor Nomor: IN/4/1.2/KP.07.6/140/1998 Tanggal 14 Mei 1998, ditetapkanlah pelaksanaan harian tugas Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah dan pembantu-pembantunya yaitu:

Dekan : Dr. Aflatun Muchtar, MA,
Pembantu Dekan I : Drs. H.M. Kamil Kamal,
Pembantu Dekan II : Dra. Dalinur M. Nur,
Pembantu Dekan III : Drs. Komaruddin Sahar.

⁴⁹*Ibid*, h. 195

Sedangkan pengangkatan staff jurusan ditetapkan dengan SK Rektor Nomor: IN/4/1.2/KP.06.6/145/1998 sebagai berikut:

Ketua Jurusan KPI : Drs. M. Amin,
Sekretaris Jurusan KPI : Dra. Hamidah, M.Ag,
Ketua Jurusan BPI : Drs. Musrin HM,
Sekretaris Jurusan BPI : Dra. Eni Murdiati.⁵⁰

Akan tetapi hal seperti ini tidak berlangsung lama karena Dr. Aflatun Muchtar, MA yang menjadi Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang, terpilih sebagai Pembantu Rektor IAIN Raden Fatah Bidang kemahasiswaan. Oleh karena itu, sebagai pelaksana tugas harian dekan ditunjuk Drs. H.M. Kamil Kamal.

Dengan keluarnya SK Menteri Agama RI tentang Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Dakwah, maka secara definitif terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2000 kepemimpinan Fakultas Dakwah sebagai berikut:

Dekan : Drs. H.M Kamil Kamal
Pembantu Dekan I : Drs. Amin S.
Pembantu Dekan II : Dra. Dalinur M. Nur
Pembantu Dekan III : Drs. Komaruddin Sahar

Karena Drs. Amin S. terpilih sebagai pembantu Dekan I Fakultas Dakwah dan Dra. Hamidah, M.Ag mengikuti pendidikan Program S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka posisi Kajur dan Sekjur KPI tidak terisi. Untuk mengatasi hal ini, Drs. M. Amin S merangkap jabatan, sebagai PD I dan Kajur KPI dan Sekjur dipilihlah Dra. Hj. Choiriyah. Berikutnya setelah Dra. Hamidah, M.Ag kembali,

⁵⁰*Ibid*

maka diusulkan untuk menjadi Kajur KPI menggantikan posisi Drs. M. Amin S sehingga struktur jurusannya sebagai berikut:

Ketua Jurusan BPI : Drs. M. Musrin HM,
Sekretaris Jurusan BPI : Dra. Eni Murdiati,
Ketua Jurusan KPI : DR. Hamidah, M.Ag,
Sekretaris Jurusan KPI : Dra. Hj. Choiriyah.⁵¹

Dengan selesainya masa tugas Drs. H.M. Kamil Kamal sebagai Dekan Fakultas Dakwah, maka berdasarkan SK Rektor, terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2004 jabatan dekan di jabat oleh DR. Hamidah, M.Ag., karena DR. Hamidah, M.Ag. terpilih dua periode sebagai Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang. Adapun struktur dekanat periode 2004-2008:

Dekan : DR. Hamidah, M.Ag
Wakil Dekan I : Drs. M.Hatta Wahid, M.Pd.I.
Wakil Dekan II : Dra. Hj. Choiriyah, M.Hum.
Wakil Dekan III : Drs. Musrin, HM.

Pada periode 2008-2012 kepemimpinan fakultas Dakwah masih dibawah kepemimpinan DR.Hamidah, M.Ag. dibantu oleh para wakil dekan yang lama dan ada yang baru, yaitu:

Dekan : DR.Hamidah, M.Ag.
Wakil Dekan I : Drs. Hatta A. Wahid, M.Pd.I.
Wakil Dekan II : Dra. Hj. Choiriyah, M.Hum.
Wakil Dekan III : Dra. Eni Murdiati, M.Hum.

Di tengah perjalanan kepemimpinan, DR.Hamidah, M.Ag., tepatnya pada tahun 2011 terjadi perubahan Wakil Dekan I, karena

⁵¹*Ibid*, h. 196

yang bersangkutan yakni Drs. Hatta Wahid, M.Pd.I meninggal dunia, maka dipilihlah DR. Kusnadi MA. sebagai PAW Wakil Dekan I periode 2009-2013.

Sehubungan dengan beredarnya kabar bahwa IAIN Raden Fatah akan melakukan transformasi menjadi UIN Raden Fatah Palembang, dipandang perlu Fakultas Dakwah mengadakan perubahan nama dengan berbagai pertimbangan bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mendukung transformasi IAIN Raden Fatah Palembang menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Maka pada tanggal 9 Maret 2010 dengan nomor surat. 03/V.2/Kp.01.2/108/2010 pihak fakultas mengusulkan kepada rektor untuk perubahan nama Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada tanggal 1 Januari 2011 keluar Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang dengan No. In.03/V/1.1/Kp.07.6/300/2010, dengan memutuskan bahwa menyetujui dan mengesahkan perubahan nama Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang.

Setelah masa kepemimpinan DR. Hamidah, MA. berakhir, berdasarkan hasil sidang senat Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang tanggal 20 Juni 2012, terpilihlah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang baru dengan masa jabatan dari tahun 2012-2016 yaitu Dr.Kusnadi, MA.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang dengan nomor surat. 03/1.1/Kp.07.5/477/2012 tanggal 23 Agustus 2012 telah ditetapkan DR. Kusnadi, MA. dengan jabatan sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah

Palembang, dan telah dilantik oleh Rektor IAIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 28 Agustus 2012.

Dengan dilantiknya DR. Kusnadi sebagai Dekan, maka jabatan Wakil dekan bidang akademik mengalami kekosongan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengangkat PAW (Pergantian antar waktu), dan Achmad Syarifudin, M.A terpilih sebagai Pejabat antar waktu 2009-2013. Adapun komposisi Wakil dekan bidang administrasi dan keuangan, serta bidang kemahasiswaan masih berlaku dan baru berakhir pada Januari 2013. Setelah masa kerja Wakil Dekan berakhir maka dipilih ulang melalui sidang senat januari 2013. Hasilnya, terpilihlah untuk masa tugas 2013-2016, sebagai

- Wakil Dekan I : Achmad Syarifudin, MA.;
- Wakil Dekan II : Drs. Aminullah Cik Sohar, M.Pd.I., dan
- Wakil Dekan III : Drs. M.Amin, M.Hum.

Seiring dengan perubahan status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah dan perubahan statuta sekaligus juga struktur organisasi, maka disusunlah struktur organisasi baru baik di tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas. Adapun struktur organisasi di tingkat Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang adalah:

- Dekan : DR. Kusnadi, MA.
- Wakil Dekan I : DR. H. Abdul Razzaq, MA.
- Wakil Dekan II : Dra. Hj. Dalinur M. Nur, MM.
- Wakil Dekan III : Manalullaili, M.Ed.

Sementara, struktur organisasi di tingkat Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang adalah:

- Kaprodi KPI : Anita Trisiah, M.Sc.
 Sekprodi KPI : Muslimin, M.Kom.I.
 Kaprodi BPI : Neni Noviza, M.Pd.
 Sekprodi BPI : Hj. Manah Rasmana, M.Si.
 Kaprodi Jurnalistik : Sumaina Duku, M.Si.

Seiring dengan peralihan status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah dan seiring dengan tuntutan pasar, maka per tahun ajaran 2016/2017 dibuatlah dua jurusan baru di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Kaprodi MD : Candra Darmawan, M.Hum.
 Sekprodi MD : Anang Walian, MA. Hum.
 Kaprodi PMI : Mohd. Aji Isnaini, M.Si.
 Sekprodi PMI : Muzayanah, M.Pd.⁵²

Jadi saat ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki lima program studi yakni Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Jurnalistik, Manajemen Dakwah (MD) dan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dengan konsentrasi masing-masing. Dari kelima program studi itu yang paling lama beroperasi adalah program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dengan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) yang seusia dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sendiri.

⁵² Tim Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pedoman Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang: Rafah Press, 2018), h. 6 – 10

B. Visi, misi dan tujuan KPI

1. VISI

Terwujudnya Program studi sebagai lembaga pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2030 dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami;
2. Melakukan riset dan pengembangan dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami;
3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Mengembangkan kerjasama dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami.

3. TUJUAN

Tujuan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dirumuskan menjadi:

1. Menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami;

2. Mengembangkan riset bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam dan mampu mempublikasikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk jurnal lokal maupun internasional dalam versi cetak dan online serta terlibat pada pertemuan ilmiah;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami.

Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat meningkatkan kualitas lulusan yang berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami.⁵³

C. Perkembangan mahasiswa dan Deskripsi matakuliah KPI

Mahasiswa KPI mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hingga saat ini jumlah mahasiswa mencapai 550an dimulai dari mahasiswa angkatan tahun 2012an hingga 2018.

Deskripsi kurikulum KPI dapat dilihat dari sajian matakuliah per semester yang telah disusun sebagai berikut:⁵⁴

SEMESTER I

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	UIN1013	Studi Keislaman	3
2.	UIN1022	Pancasila	2
3.	UIN1042	Bahasa Indonesia	2
4.	UIN1052	Bahasa Arab	2

⁵³ *Ibid.*, h. 14

⁵⁴ *Ibid.*, h. 24-26

5.	UIN1062	Bahasa Inggris	2
6.	KPI1122	Kewirausahaan	2
7.	KPI1132	Filsafat Ilmu	2
8.	KPI1142	ISD/IBD	2
9.	KPI1152	Pengantar Ilmu Komunikasi	2
10.	KPI1162	Ilmu Dakwah	2
11.	KPI1172	Azaz-Azaz Manajemen	2
Total			23

SEMESTER II

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI2182	Metodologi Studi Islam	2
2.	KPI2193	Komunikasi Islam	3
3.	UIN2032	Kewarganegaraan	2
4.	KPI2202	Teori Komunikasi	2
5.	KPI2212	Filsafat Dakwah	2
6.	KPI2222	Psikologi Komunikasi	2
7.	KPI2232	Filsafat dan Etika Komunikasi	2
8.	KPI2242	Ilmu Tasawuf	2
9.	KPI2252	Pengantar PR	2
10.	KPI2262	English for Specific Purpose	2
11.	KPI2272	Bahasa Arab untuk Dakwah	2
Total			23

SEMESTER III

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI3282	Komunikasi Politik	2
2.	KPI3292	Komunikasi Organisasi	2
3.	KPI3302	Komunikasi Massa	2
4.	KPI3312	Sosiologi Komunikasi	2
5.	KPI3322	Komunikasi Interpersonal	2
6.	KPI3332	Pengantar Periklanan	2
7.	UIN3342	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2
8.	KPI3352	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	2
9.	KPI3362	Dasar-Dasar Siaran Radio dan TV	2
10.	KPI3372	Manajemen PR	2
11.	KPI3382	Fiqh Dakwah	2
12.	KPI3392	Psikologi Dakwah	2
Total			24

SEMESTER IV

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI4402	Komunikasi Antar Budaya	2
2.	KPI4412	Fotografi	2
3.	KPI4422	Manajemen dan Produksi	2

		Media Dakwah	
4.	KPI4432	Teknik Penulisan Naskah PR	2
5.	KPI4442	Retorika dan Public Speaking	2
6.	KPI4452	Metodologi Dakwah	2
7.	KPI4462	Marketing PR	2
8.	KPI4472	Opini Publik	2
9.	KPI4482	Praktek Ibadah Kemasyarakatan	3
10.	KPI4492	Sosiologi Dakwah	2
Total			21

SEMESTER V

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI5503	Komunikasi Visual	2
2.	KPI5512	Statistik Sosial	3
3.	KPI5522	Teknik Pidato	2
4.	KPI5534	PPL	2
5.	KPI5542	KKN	4
6.	KPI5552	Produksi Media PR	2
7.	KPI5562	Metode Penelitian Komunikasi	2
8.	UIN5112	Islam dan Peradaban Melayu	2
Total			19

MATA KULIAH PILIHAN KOMPETENSI ADVERTISING

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI51572	Penulisan Naskah Iklan	2
2.	KPI51582	Layouting Iklan	2
Total			4

MATA KULIAH PILIHAN KOMPETENSI BROADCASTING

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI 52572	Jurnalisme Radio dan Televisi	2
2.	KPI 52582	Teknik Reportase dan Wawancara	2
Total			4

SEMESTER VI

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI6592	Desain Grafis	2
2.	KPI6602	Seminar Proposal	2
3.	KPI6612	Multimedia Komunikasi Dakwah	2
4.	KPI6622	Event Management	2
5.	KPI6632	MC dan Protokoler	2

6.	KPI6642	Teknik Lobi dan Negosiasi	2
7.	KPI6652	PPM	2
8.	KPI6662	Kampanye PR	2
9.	KPI6722	Cyber PR	2
Total			18

MATA KULIAH PILIHAN KOMPETENSI ADVERTISING

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI61682	Manajemen Periklanan	2
2.	KPI61692	Riset Periklanan	2
3.	KPI61702	Marketing Periklanan	2
Total			6

MATA KULIAH PILIHAN KOMPETENSI BROADCASTING

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI61682	Manajemen Produksi Siaran Radio dan Televisi	2
2.	KPI61692	Teknik Editing Visual dan Audio	2
3.	KPI61702	Marketing Program Radio dan Televisi	2
Total			6

SEMESTER VII

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	KPI7716	Skripsi	6
Total			6

Dilihat dari sajian matakuliah KPI dapat dipahami bahwa kompetensi Khatib secara khusus memang tidak didalami, namun ada beberapa yang relevan berkaitan dengan ilmu dakwah pada beberapa matakuliah seperti retorika dan public speaking, teknik pidato, dan sebagainya.

Adapun matakuliah pilihannya juga sesuai dengan peminatan yakni Kompetensi Kehumasan dan pertelevisian. Selain itu, matakuliah yang bermuatan keislaman sangat minim sekali, misalnya ulum al-Quran dan Hadis, atau Fiqih secara rinci tidak disajikan lagi secara langsung melainkan diramu pada matakuliah studi Keislaman.

Meskipun demikian, jika ditilik kembali, nomenklatur KPI sebagai prodi yang paling awal dan menjadi jargon Fakultas Dakwah dan Komunikasi perlu melakukan reorientasi, jika tidak ingin jati dirinya tergerus oleh program studi lain. Sebagai contoh, kurikulum prodi Komunikasi Penyiaran Islam perlu senantiasa direorientasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵⁵

Ekspektasi mahasiswa KPI Salatiga, misalnya, digambarkan bahwa motivasi diri mahasiswa di Jurusan baru KPI IAIN Salatiga.

⁵⁵ Adnani, Kamila. "Reorientasi Kurikulum Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Surakarta." *Kodifikasia* 6.1 (2012): 1-16.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar mahasiswa adalah diantaranya yang penting kuliah, tidak penting program apa yang diambil, ada juga untuk pemenuhan pengetahuan tentang dunia komunikasi dan penyiaran untuk meneruskan hobinya dalam dunia penyiaran pasca jurusan SMK. Mengenai eager expectation mahasiswa KPI IAIN Salatiga, terbagi pada beberapa pengharapan; yaitu pengharapan dari proses dan pembelajaran sampai materi pendukung dari proses pembelajaran tersebut, misalnya peralatan-peralatan yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran, seperti kamera, handycamp, stasiun radio. Mampu memberikan kualifikasi ilmu sehingga harapan masa depan mereka pasca lulus dengan menjadi sarjana komunikasi dan penyiaran dapat menghadapi tantangan di dunia kerja.⁵⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya alumni dari prodi KPI memiliki ekspektasi untuk dapat berkiprah di hampir seluruh lini kehidupan dan bidang kerja. Ada yang mengistilahkan dengan “kunci inggris” yang dapat berguna bagi setiap ukuran baut/mur. Artinya bahwa skill yang dimiliki oleh para alumni prodi KPI secara spesifik mampu bekerja pada bidang broadcasting, presenter, MC dan kehumasan, namun secara umum dapat aktif dan mumpuni dalam bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan karena menjadi komunikator Islami artinya memiliki kompetensi memfasilitasi informasi dengan memiliki karakter islami.

⁵⁶ Ali, Mukti. "EAGER EXSPECTION DAN MOTIVASI MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM IAIN SALATIGA." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 1.2 (2016): 203-222.

KPI adalah jurusan Ilmu Komunikasi. Namun, karena ada di kampus Islam, namanya ditambah “Penyiaran Islam” sehingga menjadi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Di jurusan ini, mahasiswa dibekali ilmu dan keterampilan berkomunikasi untuk kepentingan syi’ar Islam (dakwah). Penyiaran Islam artinya penyebarluasan pesan-pesan keislaman. Bahasa Inggrisnya *Islamic Broadcasting* yang bermakna menyiarkan Islam di radio, televisi, dan film serta internet atau lembaga penyiaran Islami (radio, tv, dan film dakwah).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pro-Kontra Standardisasi Khatib.

Berdasarkan hasil wawancara maka terjadi pro – kontra seputar standarisasi bagi Khatib. Secara rinci dapat dilihat dari hasil jawaban para responden berikut ini:

Respons NS 1	Respons NS 2	Respons NS 3	Respons NS 4
- Hemat saya sendiri secara pribadi tidak setuju adanya standarisasi tersebut ya paling tidak ini menyamakan persepsi ya bahwa seorang khotib itu sama dengan mendakwah jadi fungsi pendakwah itu kan menyeruh dan mengajak kedalam kebaikan, menyeruh dan mengajak itu berhasil atau	Bermula dari keawatiran atau banyaknya khatib itu yang dalam isi atau materinya itu mengandung mungkin ujaran-ujaran yang mengandung unsur kebencian kemudian materi-materi yang di sampaikan itu propokatif misalnya gitu sehingga perlu di berikan semacam panduan agar materi khotib itu ya isinya tidak propokatif kemudian tidak ada	Persoalan standarisasi Khatib sebenarnya penting dan tidak penting. Dikatakan penting diadakan agar memang ada standar khusus yang dipenuhi oleh Khatib. Artinya untuk menjadi seorang khatib tidak sembarangan, harus ada kualifikasi atau kompetensi yang di miliki. Namun, wacana itu sedikit sulit	- Hemat saya, pertama posisinya sebagai akademisi di bidang ilmu dakwah artinya sebagai akademisi di kampus Islam dan fokus bidang manajemen dakwah. Sisi yang lain fokus yang kedua adalah dan juga salah satu di antara masyarakat muslim yang diamankan

<p>tidak berhasil orang yang kita seru itu kembali kepada tuhan kembali kepada allahkarna itu terkait masalah hati, masalah hati ini yang bisa memantapkan hati yak an, yang bisa membolak balikkan hati itu kan hanya tuhan cuman allah jadi kalau seandainya hati ini menerima apa yang di sampaikan khotib terbut insya allah dia akan mengikuti dan itu termasuk dakwah yang berhasil tapi yang namanya mengajak ya sifatnya yang pertama tidak boleh memaksa yang kedua yang disampaikan itu</p>	<p>hujatan dan ujaran kebencian lebih kepada materinya itu misalnya mengajak kebaikan intinya ya mengajak-ngajak masyarakat yang putus asa menjadi semangat itu menurut saya ya kenapa munculnya isu itu, tapi pada dasarnya isu itu kan tidak jadi bahwa standarisasi khotib itu harus punya sertifikat khotib karna kalau di buat sertifikasi khotib maka akan banyak masjid-masjid itu tidak punya khotib karena harus di sertifikasi dulu kemudian lembaga yang mensertifikasi itu siapa yang mensertifikasi itu kemudia jika dose</p>	<p>diaplikasikan, bukan sedikit tapi sulit diaplikasikan. Mengingatkan Indonesia ini tersebar dari sabang sampai marauke dan tidak hanya terdiri dari kota, kabupaten, pedalaman dan sebagainya. Jika saja aturan sertifikasi itu dilakukan. Maka yang dikhawatirkan adalah akan terjadinya masalah diakar yaitu masyarakat. Untuk daerah kota mungkin itu bisa saja dilakukan untuk masjid-masjid besar. Tapi ketika masuk kedaerah pedalaman atau</p>	<p>dan di jadwal untuk menjadi khatib. Misalnya menjadi khatib jum'at, Idul Fitri dan khatib gerhana bulan sekitar tujuh bulan lalu. Terkait dengan isu tersebut tentu ada plus dan minusnya. Satu sisi bagus sebagai upaya pemerintah agar khotbah itu punya standar. Artinya kalau tidak punya standar nanti di khawatirkan konten dari kotbah itu provokasi. Misalnya provokasi terhadap pemerintah, dakwah agar</p>
---	--	---	---

<p>bermanfaat untuk yang menyampaikan maupun yang mendengar, yang ketiga tidak menimbulkan keresahan dan juga tidak menimbulkan perpecahan.</p> <p>ya kalau memang standarisasinya itu membuat gerak khotib tidak bebas maka khotib tidak akan mampu menyampaikan esensi dari materi yang dia kuasai, sertifikatnya ya otomatis terkendala karena terkendala itu matere yang di sampaikan tidak akan pernah sampai kepada jamaah, kpada masyarakat,</p>	<p>nada lembaga yang memberikan sertifikasi misalnya memang dari kementerian agama yang memberikan sertifikasi atau guru memang ada badannya yang memberikan sertifikasi sertifikat haji dan umroh ada lembaga dan pelatihan dulu dan kemudian baru bisa memberikan bimbingan terhadap jamaah haji dan umroh dan kalau kemudian sertifikasi khotib siapa yang memberikan sertifikasinya yang sertifikat haji dan umroh saja kemudian terbatas pada orang tertentu saja yang memiliki kemampuan misalnya finansial</p>	<p>masyarakat di bagaian bawah. Nah, itu yang agak susah dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru. (Kaprodi KPI UIN RF)</p> <p>- Standarisasi boleh dilakukan tapi, bukan menjadi mutlak. Artinya untuk menjadi seorang khatib maka anda harus berstandar terlebih dahulu tidak begitu. Standar khatib itu bagus untuk dilakukan kalau dikaitkan dengan Prodi KPI, misalnya dalam beberapa mata kuliah ada ilmu dakwah,</p>	<p>mengarah tindakan islam radikal. Bisa saja sulit menghentikan khotbah kemudian diturunkan dari mimbar itu kurang etis. Karena kotbah adalah salah satu bagian dari ritual sakral dari ibadah shalat jum'at.</p> <p>- Jadi sisi positifnya itu untuk membatasi khotib agar khotbahnya itu terarah sesuai konsep pada islam keindonesiaan . Artinya tidak ada isu SARA, provokasi, dan islam</p>
---	---	--	---

<p>karena yang namanya khotib itu bebas menyampaikan pesan dan kesan kepada jam'ah tapi bebasnya tidak sebebas-bebasnya, disitu ada aturan,ada etika, knowledge, pengetahuan yang harus mendalam yang kedua skil, kemampuan di dalam menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat dilihat dari timingnya, dilihat dari situasi dan kondisinya kemudian materi yang disampaikan itu termasuk disana. kemudian attitude kesopanan menyeruh dan</p>	<p>KBIH misalnya bisa sertifikasi untuk bimbingan haji dan umroh tapi kalau sertifikasi bagi khotib maka semua khotib yang ada ya di sumatera selatan itu ya harus jangan kemudian memberikan khotbah sebelum dia memiliki sertifikat, lalu yang kedua badannya siapa yang memberikan sertifikasi khotib apa dasar atau indikator-indikator bahwa seseorang itu bisa apa ya syarat-syarat khotib itu 1,2,3, harus ada di pesantren apa itu syaratnya yang kedua harus mungkin sudah sarjana, sarjana apa misalnya sarjana usuludin atau</p>	<p>retorika dan <i>public speaking</i>. Dan beberapa mata kuliah yang berkaitan langsung dengan public speaking atau skill yang harus di miliki oleh seorang khatib. Nah, hal tersebut bisa ditekankan pada proses perkuliahan. Bahwa untuk menjadi seorang khatib atau menjadi seorang da'i atau menjadi seorang orator. Ada beberapa standar yang harus di penuhi dan akan dititipkan pada mahasiswa yang nanatinya</p>	<p>radikal. Sisi positif kedua bisa sertifikasi itu ada honor resminya dari pemerintah. Kiatan dengan hal ini bagus juga untuk para khatib apa per bulan per triwulan dari pemerintah. Sisi ngetifnya adalah adanya kesan tidak bagus seolah-olah aktivitas dakwah di interpersni oleh pemerintah. Mesti menyampaika n materi yang ditentukan pemerintah. Padahal dakwah itu bisa lebih</p>
--	---	---	---

<p>mengajak itu tidak dapat di sampaikan secara spontan harus di sampaikan dengan cara beradab, dengan cara yang beretika yak an, kalau kita menyampaikanny a dengan cara beradab, dengan cara berattitude, dengan gaya sopan santun kemudian dengan wawasan apa yang kita sampaikan itu memang menguasai insya allah jama'ah atau orang lain akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi jika apa yang kita sampaikan itu kita sendiri tidak</p>	<p>sarjana apa kan itu khotib itu harus punya syarat kan gitu, kalo imam kan ada syaratnya gini-gini gitu, ada yang dari umum kemudian dia belajar agama secara otodidak kemudian dia tau tentang syarat dan hukumnya kan gitu nah kalo sertifikasi gimana itu - Hemat saya ya itukan hanya wacana saja untuk standarisasi khotib ternyata banyak yang menolak standarisasi khotib kan makanya standarnya apa standarisasi khotib itu apa harus S2 apa harus S3 ya kan kemudian apakah</p>	<p>menjadi alumni dan turun di masyarakat. Bahwa anda untuk menjadi seorang khatib atau da'i atau orator dan lain-lain harus memenuhi standar seperti ini dan itu. Cuma itu tadi sifatnya lebih pada sosialisasi ataupun himbauan bukan merupakan sebuah patokan bahwa itu tadi untuk menjadi seorang khatib harus wajib hukumnya begini dan begitu. Sehingga kalau tidak dilakukan maka anda tidak berhak</p>	<p>elegan, bisa lebih menyesuaikan keadaan dengan tema. Artinya materi itu disesuaikan dengan tema. Jadi terkesan kurang leluasa, seolah pemerintah kurang percaya denga da'i. Padahal da'i tujuannya menyebarkan ajaran islam. - Hemat saya penting diadakan standarisasi misalnya para khatib boleh berkreasi materi ayat dan haditsnya serta improvisasi pada materi</p>
---	--	--	---

<p>mengerti seorang khotib tidak paham bagaimana dia menyeruh kepada orang lain, bagaimana dia mengajak orang lain menyeruh kepada tuhan dia sendiri saja tidak mengerti , nah ini saja bisa jadi masalah yak an. ileh karena itu kebebasan seorang khotib itu bebas tanpa batas tapi masih di dalam koridor artinya masih dalam lingkup kemasalahatan bagi umat manusia.</p> <p>- Kasi kalau lembaga itu yang berhak memberi keputusan itu hanya kementrian agama tap kalau</p>	<p>harus punya keahlian khusus misalkan dia harus bisa bahasa arab gitu berarti menjadi apa ya menjadi hak golongan tertentu kelompok tertentu misalnya dia dari pesantren tidak boleh jadi khotib atau misalnya yang dari S2, S3 berarti yang S1 nggak boleh kan gitu,</p> <p>- kalo menurut saya nggak perlu standarisasi khotib yang penting bahwa mungkin apa ya isi atau materi khotib itu yang perlu di apa ya di aturlah gitu misalkan materinya jangan propokatif atau</p>	<p>atau tidak boleh menjadi seorang khatib. Kalau menurut saya lebih menjadi patokan atau himbauan.</p>	<p>itu. Tapi jangan menyangkut isu-isu SARA. Apalagi sekarang musim politik, jangan sampai seorang khatib mendukung pihak tertentu dan bayes atau baper. Awalnya membawa materi sederhana lalu terbawa suasana. Kemudian, menjelek-jelekan calon-calon tertentu. Karna khotbah itu moment resmi, karna khotbah menjadi</p>
--	--	---	--

<p>individu mungkin kiyai, ulama ya orang-orang yang mengerti tentang agama dengan baik jadi dengan adanya standarisasi khotib itukan membuat para khotib para imam-imam masjid itu menjadi tidak bersatu, jadi mengacu pada standarisasi itu maka orang-orang yang mendapatkan sertifikat mereka mendapatkan hak untuk memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi materi khotibnya kepada jama'ah sementara ada orang yang tidak</p>	<p>misalnya kemudian ujaran kebencian atau mungkin apa mengajak kekerasan mungkin itu yang perlu di himbau yak an materi khotbahnya itu yang perlu di ubah harus membawa kesejukan lah kalo soal standarisasi ya saya bilang lembaga apa yang ke standarisasi apa kementerian agama nah misalnya apa apa dasar kementerian agama kalau misalnya mengeluarkan standarisasi khotib yang dikatakan khotib itu adalah 1,2,3 nggak ada itunya</p>		<p>komunikasi satu arah seorang khatib jangan membeda-bedakan mazhab.</p> <p>- Sesuai dengan kewenangan, kalau lembaga-lembaga dakwah insan akademisi paling sifatnya himbauan melalui fakultas bahwa khatib itu hendaklah tidak menyinggung isu SARA, provokatif, tidak kampanye dalam kondisi kotbah. Himbauan tekhnis secara</p>
--	--	--	---

<p>memiliki sertifikat standarisasi khotib tapi dia memiliki kemampuan dalam agama yang luar biasa ya secara otomatis kan dia menolak dia akan bereaksi pertama dia tidak akan mengikuti standar itu dakwah tetap berjalan, dakwah tetap berkembangdala m menyampaikan informasi materi khotibnya. orang yang mengeluarkan standarisasi itu apakah orang yang ta'auif dengan orang yang bersangkutan, apakah orang yang</p>	<p>apa maksudnya itu apa maksudnya itu payung hukumnya yakan payung hokum sebagai khotib itu apa nggak khotib itu kan ceramah, memberikan khotbah nah apakah mungkin standarisasi khotib itu hanya khotib jumat bagaimana khotib pernikahan kan ada khotib ya kan yang memberikan khutbah nikah jadi juga harus menstandarisasi “kalo hemat saya standarisasi itu tidak penting yang penting substansinya itu apa - dia harus ada retorikanya ya retorika dia harus</p>		<p>resmi adalah melalui Kementerian Agama di wilayah masing-masing misalnya Kanwil Sumsel Kota Palembang. Kalau Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidak mempunyai wewenang tapi himbauan. - Harus ada, langkah-langklah kongkrit untuk mewujudkan Khatib yang baik. contoh ada itu dan kebetulan di semester ini</p>
---	---	--	---

<p>mengeluarkan sertifikat itu sudah melakukan survey langsung dan melakukan interview langsung kepada yang bersangkutan apakarh orang-orangnya memang betul-betul kompeten untuk seorang khotib sehingga dia di berikan sertifikat standarisasi kalau memang betul ya ok tapi kalau salah, ya dari sini saja sudah menimbulkan problem untuk para khotib yang berstandarisasi dengan khotib yang tidak berstandarisasi padahal tugasnya sama-sama untu</p>	<p>tau retorikanya apa cara penyampaiannya harus tau kemudian praktek-praktek menjadi khotib itu ya di perbanyak saja dalam mata kuliah tertentu misalnya praktek khotib jadi dia banyak prakteknya pelatihan jadi pelatihan jadi khotib jadi pertemuan ini dia jadi khotib isinya tentang ini kemudia yang berikutnya jadi di latih saja pelatihannya pelatihan- pelatihan khotib jadi mereka itu tau bagaimana menjadi khotib baik dengan</p>		<p>bapak sendiri mengasuh mata kuliah retorika dakwah. Pada mata kuliah itu menyampaika n bahwa seorang khatib itu rukun dan syaratnya itu seperti ini. Sisi lain materi yang disampaikan harus bersifat inklusif dan universal. Jangan sampai ketika khotbah menghardik atau menjudge perbedaan atau paham di antara umat islam. Itu ada pada mata</p>
---	---	--	---

<p>menyeruh menagajak manusia kembali ke jalan tuhan kepada allah - jadi yang namanya formal structural ini ada ketuanya siapa, wakilnya siapa ini kan tidak mungkin jadi yang ini tidak bisa di lakukan, kecuali organisasi ya karna khotib ini kan bukan organisasi tapi ini profesi. jadi yang namanya khotib ini tidak ada strukturnya kecuali standarisasi tersebut di berlakukan oleh pemerintah kemudian selaku dewan pemerintah seperti presiden</p>	<p>retorikanya yang bagus kemudian cara penyampaiannya bagus materinya bagus atau isi materinya bagus atau sitilanya membawa apa ya itu tadi jangan propokatif, ujaran kebencian atau mengajak orang yang apa misalnya pemikiran yang liberal atau yang radikal dan lain sebagiannya itu. - prodi KPI itu sebenarnya bukan menjadi khotib tujuan ke situ kan punya visi dan misi paling tidak bisa menjadi wartawan bisa jadi penyiar bisa menjadi apa itu tapi soal bahwa dia harus jadi</p>		<p>kuliah retorika dakwah atau mata kuliah penyusunan konsep retorika dan pidato, jadi ada konsepnya. - Perlu, sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai akademisi mengarahkan itu memberikan arahan membuka pemikiran bersama, bagaimana menjadi khatib yang baik sesuai standar pemerintah yang sukses di masyarakat. - Ada dari</p>
--	---	--	--

<p>atau yang lainnya, tapi yang jadi permasalahannya presiden itu sendiri ngerti nggak khotib itu sendiri. jadi untuk formal struktural tidak mungkin tapi jika dengan pembinaan mungkin bisa namun yang di tekankan kepada para khotib adalah pemahaman materi pendalaman materi yang akan di sampaikan kepada orang lain jadi dengan adanya pembinaan secara berkala dan memiliki kredibilitas sebagai khotib.</p> <p>- pertama harus</p>	<p>khotib itu memang ya bukan dari visi dan misinya toh kemudian dia punya keahlian menjadi khotib ya itu di persilahkan, menurut saya ya nggak mesti lah kalo KPI itu harus menjadi khotib ada yang kemudian dari tarbiyah dia bisa menjadi khotib dan dari syariah dia juga bisa jadi khotib meyampaikan tentang pendidikan tentang ekonomi dan sebagainya. jadi nggak perlu secara legal bahwa dia punya kartu khotib atau apa tidak perlu yang penting dia punya syarat-</p>		<p>Kementrian Agama Kota Palembang dan Kementrian Agama Pusat. Kemudian akademisi di Fakultas, kewenangan dari MUI yang mengatur dan memahamai tentang berbagai macam ulama. Sisi yang lain perlu di undang di dudukkan juga pengurus masjid agar bisa disepakati bersama tentang jadwal tipe khatib apa yang pantas untuk</p>
---	--	--	--

<p>faham dan memiliki ilmu pengetahuan tentang agama islam kemudian faham dengan bahasa arab, bacaan alqur'an, hadist dan lain-lain jadi artinya orang yang terjun ke dunia khotib harus memiliki itu yang pertama. yang kedua memiliki akhlak yang mulia jadi seorang khotib itu menjadi panutan bagi orang lain krnanya selain mampu beretorika mampu mengolah kalimat demi kalimat yang indah di sampaikan kepada jama'ah sehingga jama'ah</p>	<p>syarat sebagai khotib itu harus terpenuhi misalnya harus beragama islam, kemudian harus membaca puji-pujian kemudian membaca solawat jadi isinya aja yang diikuti aturan itu ya nggak papa, kalo lebel khotib itu ya apa yang intinya apa pengurus masjid apa ketua masjid yang memberi sertifikat khotib tetap kan nggak bisa juga - ya itu tadi kalau ada standarisasi atau lembaga tertentu jadi monopoli pihak tertentu jadinya jadi khotib itu nanti misalnya harus lulus dari</p>		<p>khotbah. Dan juga organisasi dakwah, Ormas dakwah seperti NU, IKADI dan lain-lain. Jadi dari semua pihak yang disebutkan diatas tadi perlu membahas bersama tentang hal standarisasi khatib.</p> <p>- Adakah upaya untuk meyiapkan mahasiswa/alumni menjadi calon Khatib yang berstandar?</p> <p>- Dari Prodi sendiri mahasiwa sudah diarahkan</p>
---	--	--	---

<p>itu tersentuh hatinya akan materi yang di samaikan khotib dan juga yang pokok itu adalah memiliki akhlak yang mulia jadi kalau seorang khotib memiliki kemampuan menyampaikan materi khotibnya kepada jama'ah dengan cara yang bagus dengan cara yang indah tetapi tidak memiliki akhlak yang baik maka yang di sampaikan juga tidak ada manfaat kepada jama'ah. ketiga materinya materinya tidak menimbulkan propokatif tidak menimbulkan keresahan dan perpecahan. jadi</p>	<p>uin misalnya, atau dari STAIN atau sekolah tinggi apakah itu yang menjadi standarisasi berarti kalau keluaran dari misalnya universitas umum berarti dia tidak berhak menjadi khotib kan itu ada orang yang keluaran dari universitas umum tapi kemudia dia belajar secara otodidak dan mendalami kemudian dia menyampaikan khutbahnya itu jadi kalau misalnya standarnya itu kelompok atau dari alumni saya juga tidak setuju karna bisa jadi</p>		<p>untuk menjadi khatib yang profesional, yang diterima di masyarakat, khatib yang inklusif . Artinya dia dapat memahami perbedaan, punya suatu keyakinan boleh tapi, memahami perbedaan keyakinan juga penting. Misalnya pakai qunut dan tidak pakai qunut itu boleh.</p> <p>-Hemat saya, berkaitan dengan pemerintah, apakah serius ingin melaksanakan standarisasi</p>
--	---	--	---

<p>harus pandai-pandai meramu menjamu sedemikian rupa mater-materi yang akan di sampaikan kepada jama'ah jangan sampai jama'ah itu resah jadi meminimalisir kalimat-kalimat yang bakal membuat jama'ah itu resah itu sebisa mungkin dihindarkan. jadi membuat orang itu lebih mantap beribadah, lebih termotivasi untuk beragama islam, lebih mantap untuk beribadah di dalam islam - harus karna yang lebih tau masyarakat jadi masyarakat harus di libatkan jadi</p>	<p>orang yang dari bidang pertanian kemuadian dia bisa ceramah tentang pertanian itu, kalau misalnya di daerah dipedesaan bisa jadi bagaiman tentang bagaimana petani itu biar rezekinya atau panenya itu berkah maka misalnya harus di berikan sedekah atau mengeluarkan sedekah, jadi menurut saya tidak perlu standarisai. itupun tidak ada standarisasi dari kementerian agama ya nama-nama orang yang di keluarkan menjadi pendakwah toh</p>		<p>khatib. Kalau serius jangan sampai beberapa khatib di cecal dan perhatian pemerintah kurang dana sertifikasi juga atau pemerintah hanya isu atau karna maraknya kasus terorisme. Karna beranggapan salah satunya bisa bermunculan provokasi khatib yang radikal misalnya pada saat itu booming isu tersebut. Dari pemerintah yang punya</p>
--	---	--	--

<p>kalo seandainya kementerian agama ingin membuat standarisasi khotib tadi maka masyarakat harus dilibatkan jadi masyarakat ini bisa memilih tapi masyarakat yang faham akan agama oleh karena itu mungkin yang bisa mewakili masyarakat tersebut adalah ulama tadi, para kiyai para ustad dan lain-lain di libatkan. karena kalau masyarakat umum jelas tidak memiliki wawasan mengenai agama islam seutuhnya. jadi kalau standarisasi di buat tidak</p>	<p>rata-rata mereka mengundurkan diri. jadi tidak perlu sekolah khusus di bidang khotib yang penting itu intinya ya dari fiqh atau apa itu tidak ada mengeluarkan syarat-syarat khotib itu tidak ada tapi ya syarat-syarat khotib itu harus laki-laki seperti itu</p> <p>- kalau sudah ada misalnya dari kementerian agama sudah standarisasi khotib yg dikeluarkan oleh kementerian agama 1,2,3 misalnya lalu kemudian kita ingin agar mahasiswa dari</p>		<p>kebijakan. Kalau pun ada kebijakan serius di kelola dengan serius. Kalau tidak ada kesriusan harus dikembalikan sistemnya seperti biasa. Masyarakat pun juga selektif menilai khatib.</p> <p>- Perlu, apalagi Prodi KPI itu Komisi Penyiaran Islam artinya Prodi di bawah posisi Fakultas Dakwah dan Komunikasi secara akademisi cocok</p>
--	--	--	---

<p>melibatkan masyarakat tadi maka itulah yang menimbulkan perpecahan - Mekanismenya jelas mengumpulkan dan mencari landasan hukum benar tidaknya standarisasi itu di buat apakah dalam bentuk peraturan menteri agama atau mungkin praturan daerah. yang kedua mencari sebnyak-banyaknya informasi tentang baik tidaknya standarisasi itu di buat jadi harus banyak-banyak mencari informasi manfaat dan mudhorat dari standarisasi itu</p>	<p>KPI yang punya kemampuan retorika bisa dalam menyampaikan retorika baik di upayakan untuk memberikan kesempatan atau peluang dari media untuk memberikan pelatihan agar jam terbangnya lebih banyak kita berikan jadwal-jadwal khusus. misalnya kita tempatkan dia di wilayah-wilayah yang memang butuh khotib disana misalnya di daerah tertentu yang menjadi tempat untuk melatih dia mnejadi khotib yang professional khotib yang memiliki</p>		<p>memang. Khatib-khatib itu bermunculan dari program studi KPI. Penyiaran itu bahasa sederhananya dakwah. KPI belajar komunikasi untuk menyebarkan Islam. Bagaimana berinteraksi komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah.</p>
--	--	--	---

<p>kalo di buat kemudian yang ketiga tentu ini dilakukan bermusyawarah tentu di dalam munsyawarah itu tentu ada pro dan kontra dan di dalam musyawarah itu pasti ada masukan- masukan yang perlu untuk di rangkum dan kemudian di kaji kembali dari pernyataan- pernyataan informasi itu kemudian kita ambil kesimpulan dari berbagai macam info yang di samapaikan itu agar standarisasi ini bisa di terima oleh orang atau masyarakat</p>	<p>kemampuan. - kalau memang standarisasi itu dilakukan standarisasi maka harus dilakukan mengundang mentri agama atau kementrian agama mengundang stake holder orang-orang yang mempunyai keilmuan yang pas tentang terkait standarisasi khotib ya yang seperti itulah, semua diundang kemudian setelah itu membuat standarisasi apa dari misalkan seminar atau work shop atau apalah stelah itu kita sosialisasikan tentang standarisasi</p>		
---	--	--	--

	<p>tersebut ke masyarakat apakah itu sudah tepat atau belum, jika belum apakah butuh penambahan atau penyempurnaan begitu. dan melalui banyak tahapan-tahapan juga.</p> <p>ya mungkin inikan soal kebijakan dan aturan sedangkan KPI tidak punya kebijakan dan wewenang untuk melakukan standarisasi itu tapi boleh jadi prodi itu kemudian mengundang pakar-pakarnya untuk melakukan standarisasi khotib paling itu saja tapi soal perturan dan</p>		
--	--	--	--

	kewenang itu bukan keputusan prodi KPI tapi kewenangan kementrian agama dalam memutuskan kewenangan standarisasi khotib tersebut.		
--	--	--	--

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa standarisasi Khatib belum mendesak untuk diterapkan di Indonesia khususnya. Mengingat bahwa Peran Khatib di Indonesia tidak seperti Para Khatib di luar Negeri atau di Negara Islam yang sudah memberi jaminan kehidupan kepada para Khatib. Mereka diberikan gaji sesuai dengan tugas masing-masing sehingga tidak memerlukan pekerjaan lainnya. Di Arab Saudi, Mesir dan Malaysia, misalnya, mereka para Khatib mendapat gaji yang sesuai untuk penghidupan mereka.

Di Mataram, sebuah penelitian menegaskan bahwa saat ini sertifikasi khatib belum perlu diterapkan. Pasalnya, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya radikalisme di tengah masyarakat Mataram akibat dari khotbah Jumat. Namun demikian, para responden menekankan pentingnya upaya standarisasi dalam segala aspek keagamaan, terutama pada aspek manajemen masjid dan manajemen

kelembagaan keagamaan di bawah pembinaan Kementerian Agama RI dan organisasi kemasyarakatan Islam.⁵⁷

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa berapa temuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Sertifikasi tidak menjadi sesuatu yang urgen untuk konteks saat ini, dimana masyarakat memberikan keleluasan kepada para khatib untuk menyampaikan materi khutbahnya yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Khatib itu gelar keagamaan yang orientasi utamanya adalah ibadah sehingga klaim adanya muatan radikalisme atau penyebab munculnya radikalisme atas nama agama tidak dipengaruhi oleh materi khutbah khatib di atas mimbar. Kedua, Respon mayoritas khatib di Kota Mataram tentang sertifikasi khatib adalah kurang bijak dan kurang tepat pemerintah mensertifikasi khatib karena khatib itu merupakan tugas informal masyarakat dalam menyampaikan pesan ibadah keagamaan, dan khatib menjadi prasyarat sahnya ibadah Jumat. Dengan demikian sertifikasi akan berdampak terhadap keberlangsungan ibadah Jumat jika sewaktu-waktu khatib yang disertifikasi tidak hadir. Sertifikasi akan bermasalah pada aspek siapa dan bagaimana mekanisme sertifikasi khatib, dengan jumlah khatib yang begitu banyak menyebar di Indonesia. Ini menambah beban pemerintah jika semua itu diberikan anggaran. Usulan para khatib kepada pemerintah agar khatib lebih diberdayakan dengan mengadakan kursus-kursus metode dakwah, pelatihan-pelatihan skill secara berkala dan berkesinambungan. Dengan cara seperti ini

⁵⁷Fahrurrozi, Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respons Para Da'i di Kota Mataram, Jurnal Komunikasi Islam | ISBN 2088-6314 | Terakreditasi Menristekdikti SK. NO. 2/E/KPT/2015 | Volume 08, Nomor 01, Juni 2018 Diakses pada Oktober 2018.

pemerintah bisa membuat mekanisme standarisasi khatib dan khutbah yang layak untuk diorbitkan dan dipublikasikan di tengah-tengah masyarakat.⁵⁸

Sebagaimana namanya Komunikasi Islam, maka kegiatan komunikasi harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai etika yang dianut dalam sebuah masyarakat, hal ini dimaksudkan agar komunikasi yang dilakukan menyenangkan, memberi kebaikan dan memberi manfaat bagi pelaku komunikasi. Islam sebagai agama rahmat, ajarannya diyakini memberi kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Islam juga menempatkan komunikasi sebagai sesuatu yang penting dan bernilai ibadah apabila komunikasi itu dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam alquran dan sunnah Nabi SAW, keduanya merupakan pedoman yang berisi tuntunan hidup bagi setiap muslim yang harus dijunjung tinggi dan menjadi ukuran-ukuran dalam berkomunikasi. Etika komunikasi islami dimaksudkan sebagai sebuah nilai-nilai yang baik yang pantas dan memiliki manfaat ketika melakukan proses komunikasi, apakah komunikasi itu berupa komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi atau komunikasi massa kesemua bentuk komunikasi yang akan dilakukan tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai alquran dan sunnah Nabi SAW. Nilai-nilai etika komunikasi islami yang tertuang dalam alquran dan sunnah Nabi SAW meliputi nilai-nilai kejujuran (kebenaran). Nilai kejujuran ini meliputi nilai-nilai keadilan, kewajaran dan kepatutan. Etika komunikasi yang lain adalah nilai Falyakul Khairan au liyasmut (Katakan yang baik atau diam), selanjutnya yang terakhir adalah nilai

⁵⁸ *Ibid.*, h. 175-176

tabayyun. Ketiga nilai etika komunikasi islami ini merupakan pendidikan berkomunikasi bagi setiap muslim dalam menciptakan komunikasi yang baik menurut ajaran Islam.⁵⁹

Komunikasi Islami mengajarkan manusia menegakkan nilai-nilai kejujuran (kebenaran) dalam berkomunikasi, kemudian dalam berkomunikasi didasarkan pada perkataan yang baik (Falyakul Khairan au liyasmut), selain itu komunikasi islami juga menuntut seorang komunikator untuk teliti dan cermat dalam memahami sebuah informasi atau pesan yang diterimanya sebelum melanjutkannya kepada orang lain (nilai tabayyun). Ketiga nilai-nilai tersebut merupakan modal utama dan sebagai ukuran bagi setiap muslim dalam melakukan komunikasi, hal itu dimaksudkan agar proses komunikasi yang berlangsung mendatangkan suatu kebaikan dan keselamatan serta kebahagiaan bagi kehidupan umat manusia.⁶⁰

Secara faktual, saat ini di Indonesia, para Khatib tidak memperoleh SK atau tugas khusus dan memperoleh gaji dari Pemerintah sehingga untuk memberlakukan standarisasi, masih belum perlu dilakukan. Di samping itu, kebutuhan akan para Khatib mengingat rasio banyaknya Masjid di Indonesia menjadi faktor belum perlu nya dilakukan standarisasi apalagi sertifikasi. Akan tetapi, pembekalan untuk para Khatib terkait dengan rukun dan syarat-syarat nya mereka perlu melakukan improvisasi melalui workshop-workshop/pelatihan dan meningkatkan pengetahuan tentang khutbah dan peningkatan skill tentang khatib.

⁵⁹ Susanto, Joko. "ETIKA KOMUNIKASI ISLAMI." Jurnal WARAQAT ♦ Volume I, No. 1, Januari-Juni 2016, *E-Journal STAI As-Sunnah Deli Serdang* 1.1 (2016): 1-24.

⁶⁰ *Ibid.*, h.23

Dalam penyampaian pesan tabligh juga diperlukan adanya metode dan strategi, salah satu metode pengembangan dakwah melalui media, dengan cara memilih media yang relevan dan menunjang proses dakwah, salah satunya internet. Selain itu ada beberapa cara yang mesti dilakukan oleh seorang muballigh dalam menyampaikan dakwah, antara lain:

Khutbah merupakan salah satu bentuk dakwah bil lisan, dakwah ini dilakukan dengan menggunakan lisan antara lain: • Qoulan ma" rufun, yaitu dengan berbicara dalam pergaulan sehari-hari yang disertai misi agama yaitu agama Allah. • Mudzakarrah, yaitu mengingatkan orang lain jika berbuat salah, baik dalam ibadah maupun perbuatan. • Nasihatudin, yaitu memberikan nasihat kepada orang yang tengah dilanda problema kehidupan. • Majlis ta" lim, yaitu seperti pembahasan tentang kitab dan berakhir dengan dialog. • Pengajian umum, yaitu berdebat dengan menggunakan argumentasi serta dengan di akhir kesempatan bersama dengan menarik satu kesimpulan.

Para aktivis dakwah tidak boleh langsung "menghakimi" jama'ah berdasarkan persepsinya sendiri, tanpa mempertimbangkan apa se- sesungguhnya yang sedang mereka alami. Karena itu materi dakwah kultural tidak semata-mata bersifat fiqh sentris, melainkan juga materimateri dakwah yang aktual dan bernilai praktis bagi kehidupan umat dewasa ini. Kaedah formal ketentuan-ketentuan syari'ah yang selama ini merupakan tema utama pengajian dan khutbah harus diimbangi dengan uraian mengenai hakikat, substansi, dan pesan moral yang terkandung dalam ketentuan syari'ah dan fiqh

tersebut. Seiring dengan pergeseran ini, maka tema-tema dakwah pun yang muncul ke permukaan adalah masalah-masalah yang menyangkut lingkungan hidup, polusi udara, perubahan iklim, pemanasan global, etika bisnis dan kewiraswastaan dan, bio-teknologi dan cloning, HAM, demokrasi, supremasi hukum, etika politik, kesenjangan social ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, budaya dan teknologi informasi, gender, dan tema-tema kontemporer lainnya.⁶¹

B. Peran Prodi KPI dalam Standarisasi Khatib.

KPI sejauh ini bukan menjadi badan sertifikasi khatib atau kita bukan sebuah prodi yang bisa mengeluarkan legalisasi standar khatib. Hanya saja prodi KPI itu lebih bersifat sebagai prodi yang memberikan dasar-dasar atau standar-standar untuk bisa menjadi seorang khatib. Tapi sifatnya lebih pada himbauan atau sosialisasi. Dan karena kita adalah lembaga pendidikan, teksnya adalah kita mendidik mahasiswa kita agar mengetahui, unuk menjadi seorang khatib itu tidak hanya hapal ayat, hadits dan surah. Tapi lebih daripada itu ada hal-hal lain yang harus dimiliki.

Selain itu. Visi dan tujuan prodi KPI adalah kehumasan jadi skill khusus kedakwaan (penceramah, Khatib, Presenter) dapat dikatakan masih minim. Untuk itu kompetensi khatib, da'i, muballigh dan sejenisnya tidak harus dari alumni KPI. Bisa saja dari alumnus fakultas tarbiyah, Ushuluddin, Syariah atau fakultas lainnya. Di samping itu, jika standarisasi diberlakukan oleh Pemerintah maka

⁶¹ Bachtiar, M. Anis. 2013."Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer." *Jurnal Komunikasi Islam*. Volume 03, Nomor 01, Juni 2013

leading sektornya adalah Kementerian Agama dari Pusat hingga daerah dan peran Ulama bukan wewenang prodi KPI.

Dakwah dalam konteks: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam komunikasi Islam adalah strategi atraktif-persuasif. Artinya kegiatan penyampaian pesan dikemas semenarik mungkin dengan gaya dan model inovatif, melalui aktifitas nyata dalam dimensi tabligh, sehingga membawa dampak positif bagi akselerasi penyebaran agama serta perkembangan kuantitas umat Muslim secara nyata. Implikasi dakwah dalam konsep komunikasi Islam, berarti merumuskan konsep sistematisasi dakwah islamiah dalam framework sistem komunikasi Islam, melibatkan kerangka kerja sistem komunikasi Islam. Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat melengkapi informasi ilmiah tentang pengembangan Dakwah melalui Sistem Komunikasi Islam. Manfaat praktis bagi Fakultas dakwah dan komunikasi, khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dapat menentukan arah pengembangan dakwah, mengembangkan sistem komunikasi sebagai acuan menyusun kebijakan pengembangan kurikulum berbasis system, serta memasukkan struktur matakuliah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.⁶²

Dakwah Islam pada dasarnya merupakan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama dakwah, yang dalam prosesnya melibatkan unsur da'i, pesan dakwah, metode dakwah, media dakwah, mad'u (sasaran dakwah) dalam tujuannya melekat cita-cita ajaran Islam yang berlaku sepanjang zaman dan di setiap tempat. Sedang tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan

⁶²Hasyim Hasanah, AT-TABSYIR, Vol. 4, No. 1 Juni 2016, h. 154

kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah swt. yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah swt. sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Di era modern seperti sekarang ini sudah menjadi keharusan bagi juru dakwah untuk memanfaatkan segala teknologi yang ada untuk mempermudah pencapaian tujuan dakwah dan sasaran dakwah. Tanpa memanfaatkan media-media yang ada, dakwah tidak akan mengalami kemajuan. Salah satu media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah atau ajaran Islam kepada khalayak umum adalah televisi. Televisi digunakan sebagai dakwah karena memiliki beberapa keunggulan yaitu: pertama, keunggulan dan ciri khas yang dilahirkan televisi terutama dalam hal kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari. Televisi merupakan produk kultural yang unik. Bentuk-bentuk pemberitaan, perbincangan, visualisasi dan dramatisasi yang dikembangkan oleh televisi melahirkan suatu kultur.⁶³

Secara umum, media komunikasi banyak sekali jumlahnya mulai yang tradisional sampai yang modern. Misalnya kentongan, beduk, pagelaran kesenian, surat kabar, papan pengumuman, majalah, film, radio dan televisi. Dari semua itu, pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai media tulisan atau cetak, visual, aural dan audiovisual. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan penggunaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Salah satu media yang komunikasi yang dapat

⁶³Ahmad Zaini, DAKWAH MELALUI TELEVISI, AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 3, No.1 Juni 2015, h. 1

digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah atau ajaran Islam kepada khalayak umum adalah televisi. Dengan kecanggihan dan dampak televisi pada setiap orang yang menontonnya, maka penggunaan televisi sebagai media dakwah sangat efektif dilakukan walaupun tentu ada kekurangan di sana-sini, tetapi tidak mengurangi semangat untuk tetap menggunakan televisi sebagai media komunikasi dakwah. Adapun keunggulan-keunggulan televisi sebagai dakwah adalah sebagai berikut sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah: pertama, keunggulan dan ciri khas yang dilahirkan televisi terutama dalam hal kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari. Televisi mampu menawarkan suatu bentuk kerangka dan ekspresi kultural yang khas secara teknologi dan institusional seperti ekspresi dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas. Kedua, sebagai media audio visual (dengar pandang) keunggulan televisi terletak pada daya persuasinya yang sangat tinggi, karena khalayak dapat melihat gambar hidup dan suara sekaligus. Bahkan suara dan gambar hidup itu dapat diterima oleh khalayak pada saat sebuah peristiwa tabligh atau khutbah yang sedang terjadi, melalui liputan secara langsung. Ketiga, televisi memiliki daya jangkau (converage) yang sangat luas dalam menyebarkan pesan secara cepat dengan segala dampaknya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Selain kelebihan-kelebihan televisi, seorang mubalig/dai yang akan tampil di televisi juga harus memperhatikan gaya siaran di televisi. Pertama, seorang mubalig yang tampil di depan kamera televisi, hendaknya menyesuaikan diri dengan karakteristik kamera serta peralatan lain yang menopang suatu produksi audio-visual, seperti cahaya (lighting) yang tersorot ke

wajahnya. Kedua, mubalig yang tampil di depan kamera seyogyanya tidak mempergunakan naskah. Ketiga, mubalig, selain harus mengendalikan fleksibilitas suaranya, tidak kalah penting ialah faktor body language (bahasa tubuh), baik itu ekspresi wajah maupun gerak-gerik tubuh lainnya. Keempat, tidak kalah penting lagi, mubalig sebaiknya mampu menampilkan pribadi yang menyenangkan, suara yang menarik, serta raut wajah yang serasi.⁶⁴

Ini berarti bahwa KPI sesungguhnya bisa mengambil peran dakwah secara optimal melalui televise yang ada. Artinya memiliki skill komunikasi yang baik dalam hal apa saja, misalnya public speaking, dalam pertelevisian skill ini dapat dimaksimalkan sehingga menjadi relevan dengan tujuan dari prodi KPI itu sendiri.

C. Kurikulum responsive Standardisasi Khatib.

Kalau dari Prodi lebih mengarah pada perumusan kurikulum untuk menunjang hal tersebut. Ada mata kuliah yang berkaitan dengan kedakwaan antara lain ilmu dakwah, dari konteks komunikasinya kita ada mata kuliah komunikasi islam, retorika dan public speaking. Kemudian tehnik menulis naskah pidato, Mc dan protokoler. Kesemuanya itu mata kuliah yang ada di kurikulum KPI sangat berkontribusi besar dalam memberikan kompetensi pada mahasiswa KPI, dan jika diseriusi maka ketrika akan terjun ke masyarakat saat mereka jadi alumni dengan kompetensi-kompetensi yang matang sebagai seorang khatib.

⁶⁴*Ibid.*, h.18

Terkait dengan siapa yang memiliki wewenang terkait dengan standarisasi khatib yang mengeluarkan adalah Pemerintah melalui Kementrian Agama atau Presiden langsung yang diturunkan kepada Kementrian Agama. Kalau memang aturan itu resmi seorang khatib legalisasi atau punya sertifikasi standar khatib. Bisa saja KPI berkontribusi dalam hal tersebut. Bisa saja KPI berkerja sama dengan Kementrian Agama dengan bagiannya. Namun untuk saat ini KPI belum bisa berbuat banyak.

Salah satu implikasi yang dapat diperoleh dari sistem komunikasi yang Islam secara epistemologis berkaitan dengan keamanan keilmuan menyangkut bagaimana batasan dan cara mengetahui sistem komunikasi Islam, dengan kata lain mempersoalkan objek materia dan forma sistem komunikasi Islam dalam dakwah. Yang kedua dalam ontologis keilmuan sistem komunikasi Islam, hal ini berarti mendasarkan pada apaapa saja yang harus diketahui dan dipelajari, dengan kata lain mempersoalkan pembedangan, rincian disiplin sistem komunikasi Islam serta metodologi yang digunakan untuk pengembangan dakwah melalui sistem komunikasi Islam. Ketiga berkaitan dengan axiologis yaitu kemanfaatan sistem komunikasi Islam dalam Kegiatan Dakwah Islamiyah. Dengan mendasarkan pada implikasi keilmuan tersebut, maka kegiatan dakwah tidak hanya berorientasi pada kegiatan praktis melainkan sebagai suatu sebagai sistem yang menjelaskan interaksi antar unsur komunikasi dakwah serta problem interaksi tersebut. Selanjutnya implikasi yang terbentuk dalam kemanfaatan sistem komunikasi islam atau dakwah melahirkan alternatif problem solving dalam menyelesaikan problem

kemasyarakatan melalui sistem komunikasi Islam baik dengan memanfaatkan sistem pers dakwah maupun sistem teknologi dakwah secara integral dan komprehensif.⁶⁵

Di PTKI lainnya, misalnya Surakarta, Kurikulum Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Surakarta adalah dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan tersebut maka tersusun kurikulum sebagaimana yang diterapkan sampai saat ini, yang cukup relevan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat kini. Distribusi Pengelompokan mata kuliah prodi KPI (sejak 2007) berdasarkan komponennya : a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) : 21 sks b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) : 43 sks c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) : 63 sks d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) : 19 sks e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) : 4 sks.⁶⁶

Untuk membekali mahasiswa dalam dunia kerja, Program studi KPI Jurusan Dakwah dan Komunikasi FUD IAIN Surakarta melakukan beberapa hal, dalam konteks ini adalah melakukan revisi kurikulum. Kegiatan ini merupakan upaya PT agar mahasiswa siap ketika terjun ke dalam dunia kerja. Sejak berdiri, Prodi KPI Jurusan Dakwah FUD sudah 4 kali melakukan revisi kurikulum, yaitu: satu kali pada masa Drs. HM. Syakirin Alghozali MA. P.h.D., satu kali pada masa Drs. Abdul Aziz M.Ag. dan dua kali pada masa Drs. H. Ahmad Hudaya M.Ag. Dari sejumlah revisi tersebut, faktor tuntutan dunia

⁶⁵ Hasyim Hasanah, ARAH PENGEMBANGAN DAKWAH MELALUI SISTEM KOMUNIKASI ISLAM, AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 4, No. 1 Juni 2016, h.153

⁶⁶ Kamila Adnani, Ahmad Hudaya, Muhammad Fahmi, Reorientasi Kurikulum Program Studi Komunikasi, Kodifikasia, Volume 6 No. 1 Tahun 2012 Diakses pada Oktober 2018.

kerja sangat menonjol dijadikan sebagai pertimbangan, utamanya pada masa Drs. Ahmad Hudaya M.Ag. Karena itu, tidak aneh jika pada masa ini malah sudah dua kali dilakukan revisi kurikulum. Ini jelas karena dorongan dan sekaligus tuntutan serta dinamika dunia kerja yang begitu cepat. Sehingga, dirasakan bahwa revisi kurikulum harus dilakukan agar kurikulum bisa selalu up to date dengan realitas dan dinamika pasar kerja.

Selain itu, KPI IAIN Surakarta siap mengemban tugas atau berprofesi sebagai berikut : a. Praktisi Komunikasi (jurnalis, humas /public relations, advertising programmer, perencana pesan, kameramen, fotografer, praktisi perfilman, broadcaster, dan sebagainya) b. Dai atau muballigh c. Penulis, bekas keilmuan jurnalistik dan komunikasi menjadi sarana sangat tepat untuk mendukung keterampilan menjadi penulis. d. Wirausahawan, bekas keahlian praktis dalam bidang komunikasi seperti desain grafis, komputer dan fotografi sangat tepat untuk menjadi sarana keterampilan berwirausaha dalam bidang-bidang terkait seperti pembuat iklan, layout dan setting, fotografer.

Di samping tuntutan profesional, sebagai mahasiswa dan calon sarjana komunikasi seperti di atas mahasiswa program studi Komunikasi dan Guru Besar UI bidang Bisnis Internasional Ferdinand D Saragih dan Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang Kusdi Raharjo berpendapat bahwa selama ini di Indonesia kurang fokus mengembangkan kurikulum yang terkait dengan kebutuhan dunia kerja dalam masyarakat. Karena itu perlu penataan ulang agar kurikulum connect dengan realitas yang

berlangsung di dalam dunia kerja di masyarakat. Penyiaran islam (KPI) juga dituntut sebagai bagian dari keluarga besar Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Sebagai bagian dari PTAI, mahasiswa dan alumni program studi KPI tidak hanya diharapkan cakap dari segi keilmuan dan keterampilan professional, tapi juga menguasai ilmu keislaman dengan baik.⁶⁷

Dalam dunia akademi, kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Hal tersebut dicantumkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002. Seorang yang kompeten harus dapat memenuhi persyaratan: (i) landasan kemampuan pengembangan kepribadian, (ii) kemampuan penguasaan ilmu dan ketrampilan (*know how and know why*), (ii) kemampuan berkarya (*know to do*), (iii) kemampuan mensikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai dan mengambil keputusan secara bertanggungjawab (*to be*), dan (iv) dapat hidup bermasyarakat dengan bekerjasama, saling menghormati dan menghargai nilai- nilai pluralisme, dan kedamaian (*to live together*).

Menurut Spencer & Specer, ada 2 (dua) kompetensi yang berkaitan dengan bidang kerja, pertama *generic competencies*, merujuk pada kompetensi yang perlu ada pada semua SDM mengarah ke *softskills*, sikap mental dalam bekerja, dan yang kedua *functional competencies* yang merujuk pada kompetensi khusus yang diperlukan bagi suatu fungsi atau pekerjaan tertentu mengarah ke *hardskills* dan

⁶⁷ Kamila Adnani, Ahmad Hudaya, Muhammad Fahmi, *op.cit.*,h. 13

kemampuan teknis. Sedangkan di lapangan, kompetensi tersebut terbagi atas kebutuhan kemampuan *knowledge*: diukur melalui ujian penilaian yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, *skill*: diukur dengan mengikutsertakan ke dalam pelatihan-pelatihan tertentu dan *attitude*: diukur secara lebih subjektif melalui penilaian terhadap perilaku yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas.⁶⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi bahan acuan formal bagi setiap warga Negara Republik Indonesia khususnya bagi para pejabat dan petugas yang menangani pendidikan. Pada pasal 25 dijelaskan bahwa:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan, digunakan sebagai penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- 2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata
- 3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan
- 4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Pada pasal 26 ayat (4) khusus membahas kompetensi lulusan perguruan tinggi disebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan

⁶⁸ Dikutip oleh Taufik, dkk, **PEMANFAATAN KOMPETENSI AKADEMIK LULUSAN PRODI KPI UIN AR-RANIRY DALAM DUNIA KERJA** Jurnal Al-Bayan / VOL. 20, NO. 29, JANUARI - JUNI 2014

seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Menyimak PP no 19 tahun 2005 ini maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan bukan saja merupakan kompetensi mata pelajaran yang telah dirancang oleh program studi belaka tetapi juga mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Standar Kompetensi Lulusan bertujuan mempersiapkan lulusan selain dapat menemukan, mengembangkan, menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat juga lulusan diharapkan berakhlak mulia dan mandiri
- 3) Standar Kompetensi Lulusan perguruan tinggi ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 4) Standar kompetensi lulusan (SKL) dirancang berdasarkan masukan dari stakeholder internal maupun eksternal serta SWOT analysis, kemudian disusun Kurikulum, method of delivery dan assessmentnya sehingga proses pembelajaran secara keseluruhan dapat memberikan kompetensi yang diinginkan pada lulusan.

Mengacu pada standard dan indikator alumni, maka sesungguhnya program studi KPI dapat menempatkan dirinya dalam seluruh lini kehidupan. Namun seiring berkembangnya prodi-prodi lain misalnya Manajemen Dakwah dan Pengembangan masyarakat Islam. Dapat dimungkinkan peran dakwah dan secara spesifik bagi pengembangan dakwah prodi-prodi yang baru tersebut diharapkan lebih banyak mengambil peran. Sedangkan KPI sendiri lebih

memfokuskan dirinya pada pengembangan broadcasting, kehumasan, dan keahlian sejenis.

Dengan demikian peran prodi-prodi baru sebagai pengembangan prodi yang lama yakni prodi KPI memperoleh peluang untuk melakukan inovasi-inovasi dan kreatifitas untuk mengembangkan keterampilan kedakwahan terutama menyangkut kualifikasi para muballig, da'i termasuk Khatib sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi Islami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Standarisasi Khatib belum perlu dilakukan karena beberapa faktor antara lain Pemerintah belum mampu mengkaver seluruh kebutuhan hidup mereka jika para Khatib menjadi tanggungan Pemerintah. Selain itu banyaknya masjid/mushalla menjadi penyebab banyaknya kebutuhan akan eksistensi Khatib sehingga keberadaannya sangat urgen bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam belum perlu untuk standarisasi Khatib karena orientasi lulusan Prodi KPI UIN Raden Fatah bukanlah untuk menghasilkan sarjana bidang da'i atau Khatib secara spesifik. Namun seandainya mereka para lulusan KPI yang ingin menekuni bidang tabligh, teori-teori yang disajikan dalam matakuliah terkait keterampilan public speaking cukup menjadi bekal dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian ini maka Peneliti menyarankan kepada:

- Pihak Fakultas Dakwah dan Komunikasi agar menyambut sinyal dan peluang pengembangan Prodi terutama terkait dengan peningkatan skill public speaking. Fakultas dapat mengembangkan skill kedakwahan, kompetensi SDM dalam

bidang penyiaran Islam, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan profesionalisme.

- Kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Kemenag RI agar mengimbangi setiap kebijakan yang akan diterapkan, meskipun terkadang berbasis wacana namun sangat berdampak kepada masyarakat luas karena sebagai pemegang otoritas dalam urusan keagamaan dan bersentuhan langsung dengan khalayak ramai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripudin, Acep. 2011. *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. 1993. *al-madkhal ila ilm al-da'wah* . Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. t.t. *Ihya' 'Ul um al -Din*. Semarang: Toha Putra.
- Ahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosdakarya.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2014. *Muhammad saw The Greatest Inspirator & Motivator*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Aziz, Moh. Ali. 2009. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana.
- Enjang dan Aliyudin, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah Pendekatan filosofis dan Praktis*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Hamidy, Zainuddin dkk. 1992. *Shahih Bukhari I-IV*, edisi terjemah, Jakarta: PT. Bumirestu. Ismail,
- Ilyas, A. dan Hotman, Prio. 2013. *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ilaihi, Wahyu, 2010, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja rosda karya.
- Kusnawan, Aep. 2004. *Ilmu Dakwah Kajian Berbagai Aspek*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhyiddin, Asep dan Safei, Agus Ahmad. 2002. *Metode Pengembangan Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Natsir, M., 1989. Fiqhud Dakwah, Solo: Ramadhani.

- Subandi, Ahmad. 1994. *Ilmu Dakwah Pengantar Kearah Metodologi*, Bandung: Syahida.
- Zaydan, Abdul Karim. 1993. *Ushul al-Da'wah* . Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- G. Lugandi, Pendidikan Orang Dewasa (Sebuah Uraian Praktek, Untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih dan Penyuluh Lapangan), (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 29
- Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 77
- Superfikir, 2012. *Islamic Public Speaking A Powerful Secret for Powerful Muslim Public Speaker*. Solo: Tinta Medina
- Abdullah Sungkar 1993, *Kunci Sukses Da'wah Islam*. Jakarta: PT. Arista Brahmadyasa
- Wahidin Saputra. 2008. *Pengantar Ilmu Dakwah*, Bandung: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Al-Fabeta.
- RB. Khatib Pahlawan Kayo, 2007, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Amzah,
- Abda, Slamet Muhaemin. 1994. *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Al-Audah, 1994 Syaikh Salman Bin Fadh. *Suka Duka Da'iyah*. Jakarta: CV. Pustaka Mantiq.

- Hafi, Anshari.1993. *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Khaliq, Syaikh Abdurrahman Abdul. 1996. *Strategi Dakwah Syar'iyah*. Jakarta: Pustaka Mantiq.
- Su'ud bin Malluh bin Sulthan. 2008. *Al- 'Anazi, al-Inba' bi aakhta'I al-Khutaba*, terj. Ahmad Zubaidi. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-dasar strategi dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.th).
- Hasanah, Hasyim, "Arah Pengembangan Dakwah Melalui Sistem Komunikasi Islam." *At-Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*.
- Basri, A. 2014."Kecenderungan Internet Addiction Disorder Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Ditinjau Dari Religiositas." *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*.
- J. Suyuthi Pulungan Dkk, 2001. *Buku Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah*. Palembang: UIN Raden Fatah Press.
- Tim Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018. *Pedoman AKademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang*, Palembang: Rafah Press.

Sumber dari Website dan Jurnal:

<http://metrouniv.ac.id/?page=konten&&cur=08a29aa74163df38a64b0059bae11b83> 12 Oktober 2018.

<https://nasional.tempo.co/read/845252/standardisasi-khatib->

[TEMPO.CO](https://nasional.tempo.co/read/845252/standardisasi-khatib-), Jakarta.

<https://nasional.tempo.co/read/844202/standardisasi-khatib-kiai-lirboyo-negara-sudah-terlalu-jauh/full&view>.

<https://m.tempo.co/read/843476/mui-tak-keberatan-pemerintah-sertifikasi-khatib-syaratnya/full&view>.

[https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/02/08/o11z48319-standardisasi-khatib-1\)](https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/02/08/o11z48319-standardisasi-khatib-1)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38805823>.

<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1378950430-perlukah-lisensi-buat-para-khatib-untuk-khutbah.html>.

<https://www.uinjkt.ac.id/id/menag-kukuhkan-pengurus-askopis/>

Oktober 2018.

Aliyudin, Kualifikasi da'i **Sebuah Pendekatan Idealistik dan Realistik**, jurnal **ANIDA** Vol 14 No 2 Juli-Desember 2015 p-ISSN 1410-5705 diakses pada Maret 2017.

Adnani, Kamila. 2012. "Reorientasi Kurikulum Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Surakarta." *Kodifikasia* 6.1

Ali, Mukti. 2016. "EAGER EXSPECTATION DAN MOTIVASI MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM IAIN SALATIGA." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 1.2

Arsam, Persepsi Para Mubaligh Persepsi Para Mubaligh Persepsi Para Mubaligh Terhadap erhadap Wacana Kontroversi Standardisasi acana Kontroversi Standardisasi acana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh Khatib dan Sertifikasi Mubaligh

- (Studi Terhadap Para Mubaligh terhadap Para Mubaligh di Banyumas), KOMUNIKA, Vol. 11, No. 2, Juli - Desember 2017.
- Fahrurrozi, Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respons Para Da'i di Kota Mataram, *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 08, Nomor 01, Juni 2018.
- Fahrurrozi, 2018. Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respons Para Da'i di Kota Mataram, *Jurnal Komunikasi Islam* | ISBN 2088-6314 | Terakreditasi Menristekdikti SK. NO. 2/E/KPT/2015 | Volume 08, Nomor 01, Juni.
- Hasyim Hasanah, AT-TABSYIR, Vol. 4, No. 1 Juni 2016, h. 154
- Ahmad Zaini, DAKWAH MELALUI TELEVISI, AT-TABSYIR: *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 3, No.1 Juni 2015, h. 1
- Hasyim Hasanah, 2016. ARAH PENGEMBANGAN DAKWAH MELALUI SISTEM KOMUNIKASI ISLAM, AT-TABSYIR: *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 1 Juni.
- Kamila Adnani, Ahmad Hudaya, Muhammad Fahmi, Reorientasi Kurikulum Program Studi Komunikasi, *Kodifikasia*, Volume 6 No. 1 Tahun 2012 Diakses pada Oktober 2018.